

ISBN : 978-979-3948-72-0

AMRI P. SIHOTANG, SS, M.Hum

MENGENAL SOSIOLOGI



FAKAAAN
MARANG

C.1



Semarang University Press
Semarang
2008

2017580055

301
SIH
m
2-2

MENGENAL SOSIOLOGI

Oleh

Amri P. Sihotang, SS, M.Hum



Diterbitkan oleh :
Semarang University Press
Semarang

2008

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT)
ISBN : 978-979-3948-72-0

*Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
Tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit*

MENGENAL SOSIOLOGI

81 halaman + vii

Amri P. Sihotang, SS, M.Hum

Tata Letak : Sentot Banyuaji
Desain sampul : Sentot Banyuaji

Cetakan I tahun 2008



Penerbit
Semarang University Press
Jl. Soekarno Hatta
Semarang

KATA PENGANTAR

Disiplin Ilmu Sosiologi adalah sebuah cabang ilmu yang berkaitan erat dan menaruh perhatian besar terhadap masalah pengkajian ilmiah mengenai kehidupan manusia dalam sebuah kelompok sosial, dan dampak yang dilahirkan oleh pola tingkah laku sosial mereka.

Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek studi masyarakat. Dalam mempelajari Ilmu Sosiologi memungkinkan kita mengenal lebih jauh mengenai masyarakat secara keseluruhan yang meliputi nilai-nilai, kelompok sosial, stratifikasi sosial, sistim sosial, perubahan sosial, dan lembaga yang terbentuk di dalam masyarakat, serta kekuatan-kekuatan yang dapat mengubah masyarakat sebagai satu kesatuan sosial. Meskipun ada banyak cara untuk mengenali sosiologi, tetapi cara yang paling baik adalah melalui pengenalan terhadap konsep-konsep sosiologi dan langsung mengkaitkannya dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat.

Buku yang berjudul *Mengenal Sosiologi* disusun secara sistematis berdasarkan ruang lingkup pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasannya. Sistematika penyusunan buku ini untuk lebih memudahkan para mahasiswa menyerap pengertian-pengertian yang terdapat didalamnya, kami bagi atas Tujuh Pokok Bahasan, tiap-tiap pokok bahasan akan membahas judul-judul yang berkaitan dalam pokok bahasan masing-masing ke dalam sub pokok bahasannya.

Di dalam Bab I pokok bahasan diuraikan secara singkat tetapi cukup memberi pengertian tentang sejarah perkembangan sosiologi. Dalam sub pokok pembahasannya tentang sejarah perkembangan sosiologi, penulis menyebutkan beberapa konsep tentang sosiologi dan obyek kajian sosiologi sehingga buku ini bisa menggambarkan betapa luas dan rumitnya masyarakat sebagai objek kajiannya.

Bab II pokok bahasan dalam buku ini membahas "Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan". Bab ini merupakan landasan awal bagi para mahasiswa yang akan dan baru mempelajari ilmu sosiologi, bahwa tidak semua pengetahuan merupakan suatu ilmu; hanya

pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang merupakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ilmu pengetahuan tersebut harus dapat dikemukakan, diuji dan diketahui kebenarannya oleh umum sehingga dapat dibuktikan kebenarannya dan tentunya juga memberikan manfaat yang nyata bagi yang mau mempelajarinya.

Bab III membahas tentang "Interaksi sosial. Disini secara lebih jauh ditelusuri bagaimana proses terbentuknya interpretasi individu terhadap realitas sosial dalam masyarakat yang mengarah pada terjadinya interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial merupakan suatu konsep yang penting sekali dan mendasar sebagai akibat dari tindakan individu - individu dalam masyarakat.

Bab IV adalah pembahasan tentang konsep kebudayaan. Konsep ini khususnya sangat penting untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep masyarakat di satu pihak dikaitkan dengan konsep masyarakat di pihak lain. Namun demikian, walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan berbeda-beda, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan di mana pun berada. Di mana wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Di dalam bab ini juga akan dibahas melalui sub pokok bahasannya tentang fungsi kebudayaan dalam masyarakat, sistem budaya, perubahan kebudayaan, kebudayaan sebagai kontrol masyarakat serta bagaimana kebudayaan melindungi masyarakat.

Di dalam Bab V perhatian terutama dipusatkan pada konsep penting dalam Sosiologi yakni Lembaga Sosial. Pembahasan di sini secara lebih jauh ditelusuri bagaimana proses terbentuknya lembaga sosial. Didalam bab ini penulis menunjukkan bagaimana proses yang terjadi pada suatu norma untuk menjadi bagian dari suatu lembaga sosial, sehingga di kenal, diakui, dimengerti, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat. Proses pelembagaan sebenarnya bisa berlangsung lebih jauh lagi hingga suatu norma sosial menjadi *internalized* (mendarah daging), yaitu suatu taraf perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bab VI membicarakan masalah “perubahan sosial”. Konsep “perubahan sosial” merupakan proses wajar dan akan berlangsung terus-menerus. Namun, tidak semua perubahan sosial menuju ke perubahan yang positif sehingga persoalan ini penting dibicarakan. Didalam bab VI ini pembahasan bukan saja berkisar pada pengertian dari perubahan sosial tetapi lebih jauh lagi dibahas tentang ruang lingkup perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, bentuk perubahan sosial serta hubungannya dengan perubahan kebudayaan. Pembicaraan mengenai perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial (*social change*) dan perubahan kebudayaan (*cultural change*) dapat dipisahkan untuk keperluan teori, tetapi di dalam kehidupan nyata, keduanya tidak terpisahkan.

Bab penutup dari buku ini khusus dipergunakan oleh penulis untuk membahas tentang “modernisasi”. Pada dasarnya, semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senantiasa terlibat dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan dan arah perubahannya, berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Berbagai bidang modernisasi tersebut berproses sehingga mencapai pola-pola perikelakuan baru yang berwujud pada kehidupan masyarakat modern. Bagaimana anggapan masyarakat tersebut terhadap modernisasi dan bagaimana masyarakat menyikapinya terhadap konsep modernisasi akan dibahas selengkapnya dalam bab ini.

Akhirnya, semoga dengan diterbitkannya buku ini, dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dapat lebih membantu mahasiswa dalam menekuni bidang studi ini. Terlepas dari semua itu, buku ini tidak luput dari berbagai kekurangan, lantaran keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, tutur sapa dari pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini untuk terbitan selanjutnya.

Semarang, 1 September 2008

Penulis,

Amri P. Sihotang

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Hak Cipta	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi

Bab I

Sejarah Perkembangan Sosiologi	1
A. Sejarah Perkembangan Sosiologi	1
B. Konsep Sosiologi	2
C. Objek Studi Sosiologi	4

Bab II

Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan	7
A. Perjalanan Sosiologi di Antara Filsafat dan Psikologi	7
B. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan	7
C. Manfaat Sosiologi	11
D. Tokoh-Tokoh dan Pandangan Para Perintis Sosiologi	18

Bab III

Interaksi Sosial	25
A. Individu dan Masyarakat	25
B. Pengertian Interaksi Sosial	27
C. Ciri-ciri Interaksi Sosial	28
D. Hubungan Antara Tindakan Sosial dan Interaksi Sosial	28
E. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial	29

Bab IV

Kebudayaan	33
A. Definisi Kebudayaan	33
B. Unsur Pokok Kebudayaan	34
C. Hakikat dan Perwujudan Kebudayaan	35
D. Perwujudan Kebudayaan	36
E. Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat	37
F. Sistem Budaya dan Sistem Sosial	38
G. Sistem Nilai	39
H. Perubahan Kebudayaan	40

I. Gerak Kebudayaan	41
J. Norma-Norma Sosial	42
K. Kebudayaan sebagai Kontrol Masyarakat	43
L. Kebudayaan Melindungi Manusia	44

Bab V

Lembaga Sosial	45
A. Definisi Lembaga Sosial	45
B. Latar Belakang Terjadinya Lembaga Sosial	46
C. Proses Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan	48
D. Ciri-Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan	51
E. Tipe-Tipe Lembaga Kemasyarakatan	52
F. Cara-Cara Mempelajari Lembaga Kemasyarakatan	53

Bab VI

Perubahan Sosial	55
A. Definisi Perubahan Sosial	55
B. Ruang Lingkup Perubahan Sosial	56
C. Hubungan antara Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan	57
D. Faktor Penyebab Perubahan Sosial	59
E. Bentuk Perubahan Sosial	63
F. Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Proses Perubahan	66
G. Proses Perubahan Sosial dan Kebudayaan	68

Bab VII

Modernisasi	71
A. Gejala Modernisasi	71
B. Pengertian dan Syarat Modernisasi	73
C. Perbedaan dan Persamaan Modernisasi, Westernisasi, dan Sekularisasi	75
D. Modernisasi dan Pembangunan	77
E. Ketergantungan dengan Negara Lain	78

Daftar Pustaka	79
-----------------------------	----

BAB I

SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI

A. Sejarah Perkembangan Sosiologi

Menurut sejarah, lahirnya sosiologi sangat berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat di Eropa Barat pada masa Revolusi Industri (Inggris) dan Revolusi Sosial (Prancis). Kedua revolusi ini pada awalnya diharapkan membawa kehidupan yang modern bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, pada kenyataannya, revolusi menyebabkan timbulnya berbagai kekacauan dan disharmoni hubungan antar warga masyarakat. Dengan kata lain, terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang ada.

Menurut Laeyendecker (1983: 11-43), kelahiran sosiologi selain disebabkan oleh kedua revolusi di atas, juga terkait dengan serangkaian perubahan jangka panjang yang melanda Eropa Barat di abad pertengahan. Proses perubahan jangka panjang yang diidentifikasi Laeyendecker sebagai pendorong lahirnya sosiologi ialah: (1) tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke 15, (2) perubahan di bidang sosial dan politik, (3) perubahan berkenaan dengan reformasi Martin Luther, (4) meningkatnya individualisme, (5) lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan (6) berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri.

Sedangkan Ritzer (1992: 6-9) menjelaskan, bahwa kekuatan sosial yang mendorong pertumbuhan sosiologi ialah: (1)-revolusi politik, (2) revolusi industri dan munculnya kapitalisme, (3) munculnya sosialisme, (4) urbanisasi, (5) perubahan keagamaan, dan (6) pertumbuhan ilmu.

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian.

Perbedaan yang tidak jarang menimbulkan pertentangan antara *harapan* dengan *kenyataan*, memaksa para ahli fikir untuk mencari sebab-sebabnya dengan jalan mempelajari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat, sehingga timbul berbagai macam teori tentang masyarakat.

Masyarakat yang menjadi obyek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkutan paut dengan produksi, distribusi dan penggunaan barang-barang dan jasa-jasa; ada pula segi kehidupan-politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat; dan lain-lain segi kehidupan.

B. Konsep Sosiologi

Sesuai dengan tumbuh berkembangnya peradaban manusia, maka berbagai ilmu pengetahuan yang tergabung dalam Filsafat kemudian memisahkan diri dan memihak pada urusannya sendiri. Tepatnya pada abad ke-19, Sosiologi muncul sebagai sosok Ilmu Pengetahuan yang berusaha berdiri sendiri dengan kajian tentang kehidupan manusia dalam masyarakat,, di samping muncul pula Psikologi yang mempelajari manusia sebagai individu yang berhubungan dengan perilaku dan sifat-sifat manusia.

Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat dalam proses pertumbuhannya dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan lain seperti Ilmu Ekonomi, Sejarah, Hukum, Antropologi Ilmu kejiwaan dan lain sebagainya; akan tetapi secara kenyataan dalam praktek kehidupan masyarakat dari ke semua ilmu-ilmu kemasyarakatan (sosial) tidak mungkin dapat dipisahkan.

Menurut Soerjono Soekanto (1982), bahwa perkembangan dari perhatian terhadap masyarakat seperti diuraikan di atas, terjadi pada tiap-tiap masyarakat di dunia ini. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dinamakan Sosiologi, pertama kali terjadi di Benua Eropa. Banyak usaha-usaha, baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat non-ilmiah telah berusaha membentuk Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Beberapa pendorong utamanya adalah meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sosiologi dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan social manusia dan sebagai suatu pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik dan peperangan.

Sosiologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial (social science) yang bersama-sama menghadapi masyarakat sebagai obyeknya. Seperti pernah dikemukakan oleh Auguste Comte (seorang ahli filsafat berkebangsaan Perancis) bahwa sosiologi adalah filsafat tentang manusia dan filsafat pergaulan hidup. Konsep yang dikemukakan oleh Comte tersebut mencerminkan pengertian bahwa sosiologi itu merupakan pengetahuan yang menyoroti secara tajam mengenai hubungan manusia/ golongan, asal, ras dan kemajuannya serta bentuk dan kewajibannya.

Setelah sosiologi dapat menampakkan wujudnya sebagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, maka sampai pada abad ke-20 ia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah semakin terdesak oleh kebutuhan pengetahuan yang bertanggung jawab, manusiawi dan realistik dalam

setiap menjawab tantangan hidup. Istilah Sosiologi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Socius* yang artinya teman atau kawan, dan *logos* artinya ilmu pengetahuan (pemikiran). Dapat juga *socius* diartikan sebagai pergaulan hidup manusia atau disebut masyarakat dan kemudian kata sosiologi diterjemahkan menjadi ilmu kemasyarakatan, yaitu ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Atau lebih tegas lagi dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat yang mencakup hubungan antara seseorang dengan seorang, antara perseorangan dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok dengan kelompok.

Ada beberapa pendapat sarjana yang telah mencoba untuk memberikan definisi sosiologi, yaitu sebagai berikut.

1. Comte secara sederhana mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Sosiologi berupaya memahami kehidupan bersama manusia, sejauh kehidupan itu dapat ditinjau atau diamati melalui metode empiris. Dalam sosiologi, masyarakat dipandang sebagai unit dasar analisis, sedangkan varian lainnya, seperti keluarga, politik, ekonomi, keagamaan, dan interaksinya merupakan subanalisis. Fokus perhatian sosiologi adalah tingkah laku manusia dalam konteks sosial.
2. Petirim A. Sorokin mengatakan, bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hal berikut ini.
 - a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya).
 - b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (dasarnya gejala geografis, biologi, dan sebagainya).
 - c. Ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial.
3. McGee (1977) menjelaskan sosiologi sebagai berikut.
 - a. Sebagai studi tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku individu.
 - b. *Sebagai studi tentang tatanan sosial dan perubahan sosial*
4. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengatakan, bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.
 - a. *Struktur sosial* adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial.

- b. *Proses sosial* adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Dikatakan, bahwa salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.
5. Soerjono Soekanto mempersingkat definisi sosiologi sebagai ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum.

Definisi menurut para ahli di atas memberikan batasan pengertian yang berbeda, hal ini menggambarkan betapa luas dan rumitnya masyarakat sebagai objek kajiannya. Namun, pada intinya definisi tersebut mempunyai persamaan, yaitu sosiologi mempelajari hubungan atau interaksi antar manusia dalam masyarakat. Bila dirumuskan dalam bahasa yang lebih sederhana, sosiologi adalah; *ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (seperti keluarga, kelas sosial, atau masyarakat) dan produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut, seperti nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.*

C. Objek Studi Sosiologi

Definisi menurut para ahli di atas memberikan batasan pengertian yang berbeda, hal ini menggambarkan betapa luas dan rumitnya masyarakat sebagai objek kajiannya. Berdasarkan batasan diatas, definisi sosiologi mempunyai ciri-ciri :

- sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain;
- dalam kelompok (seperti: keluarga, kelas sosial atau masyarakat); dan
- produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut, seperti nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.

Seperti telah disinggung di muka bahwa obyek studi dari sosiologi adalah masyarakat, yaitu dengan menyoroti hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang timbul dari hubungan-hubungan antar manusia tersebut. Masyarakat sebagai obyek studi sosiologi merupakan istilah tersendiri dan mempunyai definisi yang khusus. Istilah masyarakat menunjuk pada sejumlah manusia yang telah sekian lama hidup bersama dan mereka menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup. Terbentuknya sistem pergaulan dengan dibatasi oleh aturan yang telah

disepakati bersama, maka masyarakat akhirnya memiliki kebudayaan. Sudah tentu istilah masyarakat harus dibedakan dengan istilah-istilah lainnya seperti rakyat, antropologi, psikologi dan lain-lain yang juga menunjuk pada kehidupan bersama manusia.

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain:

1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama; di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa dan mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut.
2. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
3. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.

Pandangan mengenai obyek studi sosiologi umumnya para ahli memusatkan perhatiannya pada liku-liku pergaulan hidup dengan segala resiko sosialnya. Masyarakat mengandung konformitas (kepatuhan)/ artinya orang-orang yang terikat di dalamnya (masyarakat) mempunyai kecenderungan menjadi sama. Namun menurut pandangan modern, gejala konformitas ini telah semakin terkikis lantaran semakin populernya kritik-kritik sosiologi yang menganggap konformis-konformis itu sebagai status individu yang rendah tidak memiliki imajinasi dan tidak tanggap terhadap masa depan.

BAB II

SOSIOLOGI SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

A. Perjalanan Sosiologi di Antara Filsafat dan Psikologi

Dibandingkan dengan ilmu filsafat dan ilmu psikologi, sosiologi merupakan ilmu yang relatif muda. Bahkan, bila dilihat dari perjalanan munculnya sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu, sosiologi lahir setelah ilmu psikologi tumbuh mapan. Tetapi, dalam proses pertumbuhannya menjadi suatu ilmu, sosiologi berada di antara ilmu filsafat dan ilmu psikologi. Sosiologi berusaha mencari objek studinya sendiri yang berbeda dari filsafat dan psikologi. Sosiologi menghindarkan diri dari studi yang bersifat spekulatif dan skeptis sebagaimana kecenderungan dalam ilmu filsafat. Sosiologi berpegang teguh kepada suatu realitas sosial yang empiris. Psikologi juga mempunyai objek studi yang bersifat empiris, tetapi sosiologi berbeda dari psikologi karena sosiologi mempelajari fakta sosial dengan pendekatan kelompok, sedangkan psikologi mempelajari orang sebagai individu, dan karena itu menekankan pendekatan individu (Pelly dan Menanri, 1994).

B. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Setelah sosiologi berdiri menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan, permasalahan berikut yang dihadapi adalah adanya perbedaan paradigma ilmu diantara para sosiolog, sehingga Ritzer (1980) menyebut sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Paradigma yang berbeda-beda ini terjadi karena para sosiolog berbeda pandangan di dalam menentukan pokok persoalan atau substansi yang dikaji oleh sosiologi. Akibat perbedaan yang mendasar ini, maka teori-teori yang dibangun dan metode yang digunakan bervariasi pula.

Seperti telah disinggung di muka bahwa tidak semua pengetahuan merupakan suatu ilmu; hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang merupakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ilmu pengetahuan tersebut harus dapat dikemukakan, diuji dan diketahui kebenarannya oleh umum sehingga dapat dibuktikan kebenarannya.

Untuk mempermudah dalam memahami istilah ilmu dan pengetahuan perlu diawali dengan telaah tentang pemikiran manusia beserta segenap kehendak dan tindakannya. Dengan sarana pikiran manusia dapat memperoleh pengetahuan; dengan kehendaknya manusia dapat mengarahkan perilakunya. Sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dapat disebut dengan logika, sedangkan

sarana untuk memelihara serta meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian, masing-masing disebut etika dan estetika. Logika itu sendiri merupakan ajaran yang menunjukkan bagaimana manusia berpikir secara tepat dengan berpedoman pada prinsip kebenaran. Secara singkat ilmu pengetahuan itu dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis dengan landasan pemikiran yang kuat dan beralasan. Di samping itu ilmu pengetahuan itu senantiasa dapat diperiksa, ditelaah dan siap menerima kritik dari pihak lain yang ingin mengetahuinya. Hal penting yang dapat dipetik dari uraian tadi adalah bahwa rumusan ilmu pengetahuan itu setidaknya merupakan cakupan pokok dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain dengan obyektif. Ciri-ciri ilmu pengetahuan itu sendiri adalah rasional, bersifat empiris, umum dan kumulatif.

Sosiologi dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan oleh karena dapat dibuktikan bahwa ia telah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Harry M. Johnson (dalam Soerjono Soekanto, 1982) memerinci ciri-ciri utamanya sebagai berikut.

- a. *Sosiologi bersifat empiris*, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b. *Sosiologi bersifat teoretis*, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka daripada unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
- c. *Sosiologi bersifat kumulatif*, berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama.
- d. *Bersifat non-etis*, yakni yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Untuk mengetahui bukti-bukti sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, dapat dilihat penjelasan Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (1964) sebagai berikut.

- a. Telah diketahui, bahwa sosiologi adalah suatu ilmu sosial, dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Pembedaan tersebut bukanlah pembedaan mengenai metode, tetapi menyangkut pembedaan isinya, yang gunanya untuk membedakan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersangkutan-paut dengan gejala-gejala alam dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan

dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Khususnya, perbedaan tersebut di atas adalah membedakan sosiologi dari astronomi fisika, geologi, biologi, dan ilmu pengetahuan alam lain yang dikenal.

- b. Sosiologi bukan merupakan disiplin ilmu yang normatif, tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris; artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, sosiologi membatasi diri terhadap persoalan dan penilaian; artinya sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang, dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Hal ini bukanlah berarti bahwa pandangan-pandangan sosiologi tak dapat menilai apa yang buruk dan apa yang baik, apa yang benar atau salah, serta segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sosiologi dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu, tetapi tak dapat ditentukannya bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya. Dalam hal ini, sosiologi berbeda dengan filsafat kemasyarakatan, filsafat politik, etika, dan agama.
- c. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni (*pure science*), dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan (*applied science*). Perlu diketahui, bahwa dari sudut penerapannya, ilmu pengetahuan dipecah menjadi dua bagian, yaitu *pure science* dan *applied science*. *Pure science* adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak hanya untuk mempertinggi mutunya, tanpa penggunaannya dalam masyarakat. *Applied science-nya* adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menggunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat dengan maksud membantu kehidupan masyarakat. Tujuan dari sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. Sebagai perbandingan, akan diambil dari contoh-contoh dan ilmu pengetahuan lainnya, misalnya seorang ahli fisika (ilmu alam) tidak mendirikan jembatan, seorang ahli fisiologi (ilmu faal) pekerjaannya bukanlah menyembuhkan orang-orang yang sakit pneumonia dan seorang ahli dalam ilmu kimia pekerjaannya bukanlah membuat obat-obatan. Demikian juga para ahli sosiologi mengemukakan pendapat-pendapatnya yang berguna bagi petugas administrasi, pembentuk undang-undang, para diplomat, guru-guru, para mandor, dan sebagainya, tetapi mereka tidak menentukan apa yang harus dikerjakan petugas-petugas tersebut. Sosiologi merupakan ilmu

pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, tetapi sosiologi sendiri bukanlah suatu *applied science*.

- d. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, bahwa yang diperhatikan adalah bentuk dan pola peristiwa-peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujudnya yang konkret.
- e. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum umum daripada interaksi antarmanusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk isi dan struktur dari masyarakat manusia.
- f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ciri ini menyangkut soal metode yang dipergunakannya.
- g. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala yang umum, yang ada pada setiap interaksi antarmanusia. Pusat perhatian sosiologi dapat bersifat khusus, sebagaimana halnya setiap ilmu pengetahuan, tetapi lapangan penyelidikannya bersifat umum, yakni kehidupan bersama manusia.

Dengan kata lain, sosiologi dapat disebut sebagai ilmu karena sosiologi telah memenuhi segenap unsur dalam sifat ilmu pengetahuan, yakni empiris, teoretis, kumulatif, dan non-etis.

Selain itu, apabila sosiologi ditelaah dari sudut sifat hakikatnya, maka akan dijumpai beberapa petunjuk yang dapat membantu kita untuk menetapkan hakikat ilmu sosiologi. Sifat hakikat sosiologi adalah sebagai berikut.

1. Sosiologi merupakan ilmu sosial (bukan ilmu alam atau kerohanian).
2. Sosiologi bersifat kategoris (bukan normatif).
3. Sosiologi merupakan ilmu murni (bukan terapan).
4. Sosiologi adalah ilmu yang abstrak (bukan kongkret).
5. Sosiologi bertujuan untuk mendapatkan pola-pola rumusan interaksi.
6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris-rasional.
7. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum (bukan khusus).

Bagi Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir bag; perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, oleh karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pengetahuan lainnya.

Selanjutnya, Comte mengatakan, bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak ada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat. Hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis.

Penjelasan Comte di atas sangat disayangkan karena tidak menjelaskan bagaimana caranya menilai hasil-hasil pengamatan kemasyarakatan tersebut. Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842, tatkala Comte menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul *Positive-Philosophy* yang tersohor itu (Ogburn Nimkorff, 1950: 5; Soekanto, 1984).

Seorang ahli filsafat dan ahli fikir kemasyarakatan dari Inggris, yaitu John Smart Mill, menyarankan istilah "ethology" bagi ilmu pengetahuan yang baru itu. Akan tetapi, istilah tersebut tidak pernah populer di dalam masa-masa selanjutnya.

Sejak Herbert Spencer mengembangkan suatu sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul *Principles of Sociology* setengah abad kemudian, maka istilah sosiologi berkembang dengan pesatnya, terutama pada abad ke-20 di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, walaupun arah perkembangannya di tiga negara tersebut berbeda satu sama lain. Meski John Stuart Mill dan Herbert Spencer adalah orang-orang Inggris, namun ilmu tersebut tidak begitu pesat di negara tersebut, berbeda dengan keadaan di Amerika Serikat pada masa itu.

C. Manfaat Sosiologi

Berikut ini disebutkan beberapa manfaat mempelajari Sosiologi.

1. Sosiologi dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial tersebut, kita akan dapat mengenal dengan lebih jelas siapa diri kita dalam konteks hubungan antara pribadi dan pribadi, pribadi dan kelompok, serta kelompok dan kelompok.
2. Sosiologi dapat membantu kita untuk mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sosiologi mampu mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat, serta dapat melihat 'dunia' atau 'budaya' lain yang belum kita ketahui sebelumnya.
4. Dengan bantuan sosiologi, kita akan semakin memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain serta memahami perbedaan yang ada. Tanpa hal itu, menjadi alasan untuk timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berlaku.

5. Bagi kita sebagai generasi penerus kehidupan, mempelajari sosiologi membuat kita lebih tanggap, kritis dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang makin kompleks dewasa ini serta mampu mengambil sikap serta tindakan yang tepat dan akurat terhadap setiap situasi sosial yang kita hadapi sehari-hari.

Menurut Syani (2002), kegunaan sosiologi dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu (1) kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial, (2) dalam penelitian, (3) dalam pembangunan, dan (4) dalam pemecahan sosial. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut.

a. Kegunaan Sosiologi dalam Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan manusia dalam masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah pada masa-masa terjadi perubahan. Perencanaan sosial lebih bersifat preventif, oleh karena kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan-bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik. Pada masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, tidak sedikit kemungkinannya dapat berpengaruh pada kehidupan manusia, bisa berpengaruh positif dan bisa juga malah justru berakibat negatif. Secara sosiologis, perencanaan ini didasarkan pada perincian pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan hadirnya teknologi baru, berarti perlu persiapan untuk menggunakannya dengan meningkatkan kemampuan masyarakat, yang pada hakikatnya untuk mencapai kemajuan; jangan sampai teknologi itu menjadi beban dan tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Perencanaan sosial itu tentunya diarahkan pada persiapan dalam rangka mengatasi berbagai rintangan pelaksanaan pembangunan. Dalam suatu perencanaan perlu adanya kerja sama antara warga masyarakat dengan pihak perencana; dalam hal ini perlu dipersiapkan usaha-usaha yang lebih komunikatif dalam hubungan sosial sehingga kesepakatan bersama dalam suatu kerja kolektif dapat dicapai. Kesepakatan bersama sangat penting artinya dalam suatu perencanaan sosial, oleh karena di dalamnya mencerminkan usaha pencapaian tujuan dan kepentingan bersama.

Perencanaan demikian perlu dilakukan secara realistis dan konkret di bawah pimpinan kelompok perencanaan yang berkewibawaan dan paham terhadap kehendak dan harapan-harapan masyarakat. Tugas-tugas demikian relatif banyak dikuasai oleh para ahli sosiologi, terutama tentang berbagai kebijaksanaan dalam langkah mengamati proses

perubahan masyarakat. Kebijaksanaan sosiologis sangat erat kaitannya dengan berbagai unsur kebudayaan, seperti nilai-nilai, norma-norma, sikap-sikap, serta peranan-peranan sosial yang diharapkan dapat berfungsi mengajak masyarakat bekerja sama dan bergotong royong bersama dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya.

Peranan ahli sosiologi adalah mengkoordinasikan antara potensi, disiplin dan kegiatan segenap masyarakat dengan anjuran yang ada dalam perencanaan. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan lebih mudah memahami tujuan suatu perubahan atau pembangunan, kemudian melaksanakan anjuran-anjuran yang direncanakan secara sukarela, oleh karena pada dasar perencanaan itu diangkat dari kehendak dan harapan-harapan mereka. Pihak perencana sendiri harus siap mengorbankan sebagian kebebasan bertindak, kebiasaan penyesuaian diri perlu ditanamkan dalam-dalam agar kepercayaan masyarakat tetap terpatri. Bagaimana mungkin seorang penyuluh keluarga berencana berapi-api menjelaskan berbagai manfaat dan keuntungan ber-KB jika ia sendiri sedang hamil tua.

Secara umum, ada beberapa kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial, antara lain sebagai berikut.

1. Sosiologi mempunyai dasar kemampuan mendalam tentang perkembangan kebudayaan masyarakat dari taraf yang tradisional sampai pada taraf kebudayaan yang modern, seperti kompleksitas masyarakat dengan berbagai perubahan peradabannya. Dengan demikian, proses penyusunan dan memasyarakatkan suatu perencanaan sosial relative lebih mudah dilakukan.
2. Sosiologi mempunyai dasar kemampuan memahami tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antargolongan dalam masyarakat, di samping memahami pula proses pembaharuan-perubahan dan pengaruh-pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat. Hal ini berarti cara kerja sosiologis mengenai rancangan terhadap masa depan atas dasar kenyataan yang faktual dalam masyarakat relative lebih dapat dipercaya.
3. Sosiologi mempunyai disiplin ilmiah yang objektif; proses pelaksanaan kerjanya lebih didasarkan pada spekulasi dan harapan yang ideal. Dengan demikian, pelaksanaan perencanaan sosial dapat diharapkan lebih sedikit penyimpangannya.
4. Menurut pandangan sosiologi, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perencanaan tersebut dapat bermanfaat dalam menghimpun kekuatan sosial dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat.
5. Dengan berpikir secara sosiologis, maka perencanaan sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui batas-batas keterbelakangan dan

kemajuan masyarakat dari bidang kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis dan cepat diharapkan dapat disesuaikan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.

b. Kegunaan Sosiologi dalam Penelitian

Sosiologi memiliki metode-metode penelitian sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Objek penelitiannya mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia, terutama aspek yang berhubungan dengan interaksi antarmanusia dalam masyarakat. Tugasnya adalah mencari dan menemukan data faktual tentang kebenaran yang terlepas dari nilai-nilai subyektif. Informasi sosiologis yang disajikan senantiasa ditemukan melalui metode-metode ilmiah yang sudah teruji dan tidak diragukan manfaatnya atas bukti-bukti kebenaran sebagai hasil penelitiannya. Dengan kriteria semacam itu, sosiologi secara kategoris tidaklah lebih rendah daripada ilmu-ilmu lainnya dalam hal keahlian penggalan dan analisis data. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini para ahli sosiologi banyak dilibatkan dalam bidang celaah ilmiah, khususnya sebagai pencari data dalam rangka pemecahan masalah sosial. Para sosiolog dipandang sebagai personal yang memiliki kemampuan untuk duduk dalam berbagai jabatan, seperti bidang personalia, hubungan kerja atau hubungan perburuhan, dan berbagai anggota tim jenis evaluasi tingkat kriminalitas, pencemaran lingkungan dan banyak lagi bidang-bidang yang berhubungan dengan kepentingan soal-soal kemasyarakatan. David Berry (1983) mengakui, bahwa pandangan ahli sosiologi mungkin lebih teliti dibandingkan dengan orang-orang lainnya, tetapi pandangan ini tetap akan tergantung kepada kerangka pemikiran yang dianut oleh ahli sosiologi yang bersangkutan.

c. Kegunaan Sosiologi dalam Pembangunan

Pada masa perkembangan masyarakat dewasa ini, nampaknya konsep pembangunan sudah merupakan suatu ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengejar pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam suatu proses pembangunan itu perlu adanya kemauan keras serta kemampuan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluan pembangunan. Berbagai perencanaan perlu disusun dan digelar dalam rangka menghimpun kekuatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu proses pembangunan biasanya dikaitkan dengan pandangan yang optimis, yang berwujud dalam usaha-usaha

untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih daripada apa yang celah dicapai. Di dalam mencapai taraf hidup tadi, maka dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut.

1. *Struktural*; perencanaan, pembentukan dan evaluasi lembaga kemasyarakatan, prosedurnya serta pembangunan secara kebendaan.
2. *Spiritual*; pembentukan watak dan pendidikan di dalam penggunaan cara-cara berpikir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau dua-duanya.

Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi dan cara berpikir masyarakat yang tidak hanya terbatas pada golongan elit saja, melainkan secara menyeluruh dan merata sampai pada lapisan terbawah. Secara sosiologis, wujud hasil pembangunan itu hendaknya dapat diperlihatkan dan mengutamakan peruntukannya bagi masyarakat, terutama sekali bagi masyarakat miskin. Pembangunan semacam ini biasanya secara nyata diwujudkan dalam kegiatan memberikan perlengkapan hidup material, seperti pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan meningkatkan keamanan masyarakat. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan itu ditujukan pada pemberantasan terhadap indikator-indikator kemiskinan yang biasanya banyak melanda negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu contoh adalah dalam rangka upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja; bukan berarti manusia harus bekerja keras tanpa memperhatikan peningkatan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk mewujudkan itu semua, maka pemikiran-pemikiran ilmiah, khususnya metode analisis sosiologis yang kira-kira lebih memadai sangat diperlukan dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, kegunaan sosiologi bagi pembangunan dapat diidentifikasi dengan beberapa hal berikut.

1. *Pada tahap perencanaan*, sosiologi dapat berguna di dalam mengadakan identifikasi-identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, pusat-pusat kekuasaan, serta sistem dan saluran-saluran komunikasi sosial.
2. *Pada tahap pelaksanaan*, sosiologi dapat berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat serta mengamati proses perubahan sosial yang terjadi.
3. *Pada taraf evaluasi*, dapat diadakan suatu analisis terhadap efek-efek social dari pembangunan tersebut.

Pembangunan menurut konsep sosiologis adalah proses peningkatan taraf hidup masyarakat yang didasarkan pada realitas sosial; mungkin cara ini akan paling baik daripada pembangunan yang harus

ditentukan atas dasar kepentingan penguasa. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami dan menikmati hasil pembangunan sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka sendiri. Hasil-hasil pembangunan akan terpelihara dengan baik, oleh karena keberadaannya atas kehendak dan kepentingan mereka sendiri. Kegagalan pembangunan banyak sekali karena tidak memperhatikan aspek-aspek sosiologis.

d. Kegunaan Sosiologi dalam Pemecahan Masalah Sosial

Roucek dan Warren (1984) mengatakan, bahwa masalah sosial adalah masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masalah sosial adalah masalah yang melibatkan sejumlah besar manusia dengan cara-cara yang menghalangi pemenuhan kehendak-kehendak biologis dan sosial yang ditetapkan mengikuti garis yang disetujui masyarakat.

Masalah yang tergolong masalah sosial murni adalah masalah yang berhubungan dengan terjadinya benturan institusi, rendahnya pengawasan sosial atau kegagalan menggunakan kaidah-kaidah teknologi yang cepat. Kesemuanya ini tidak dapat diselesaikan dengan jalan keluar yang memuaskan.

Gejala-gejala masalah sosial itu biasanya berupa kurang terjaminnya kehidupan ekonomi, kurang terjaminnya kesehatan masyarakat, menurunnya kewibawaan pemimpin, dan berbagai bentuk konflik kepribadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Semua itu disebut sebagai masalah sosial oleh karena gejala-gejala dan peristiwanya banyak yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat secara sempurna. Oleh karena sebagian besar masyarakat tidak dapat mencapai kepuasan sebagaimana diharapkan, maka masyarakat menjadi frustrasi.

Berbagai usaha dan cara telah banyak dilakukan orang untuk menanggulangi masalah sosial, tetapi belum ada metode ampuh yang dapat menuntaskan setiap masalah sosial yang timbul. Kesulitannya, karena masalah-masalah yang timbul tidak selalu sama, baik latar belakang, waktu, maupun pengaruh-pengaruh yang menyertainya. Sementara, metode dan analisis untuk itu tidak mampu mengimbangi cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Keterlambatan untuk dapat menanggulangi masalah sosial selalu terjadi karena gejala-gejala masalah yang timbul tidak langsung dapat dirasakan sebagai masalah sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, oleh karena ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada umumnya belum sanggup untuk menetapkan secara mutlak dan pasti apa yang merupakan masalah sosial yang pokok. Lagi pula, pengaruh pemecahan-pemecahan masalah sosial tidak dirasakan dengan segera, tetapi setelah jangka waktu yang cukup lama supaya

meresap dan dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena masalah-masalah sosial ini menyangkut nilai-nilai dan perasaan-perasaan sosial, maka diusulkan bahwa metode yang paling tepat untuk dapat menanggulangi masalah sosial tersebut adalah metode-metode yang berhubungan dengan strategi kemasyarakatan.

Secara umum, ada dua metode dalam penanggulangan masalah sosial, yaitu metode yang bersifat preventif dan metode yang bersifat represif.

1. *Metode preventif dilakukan* dengan mengadakan penelitian yang mendalam terhadap kemungkinan gejala-gejala sosial yang dapat menimbulkan masalah sosial.
2. *Metode represif* adalah proses penanggulangan secara langsung terhadap masalah sosial yang sedang tumbuh dan dirasakan oleh masyarakat; artinya tindakan penanggulangan baru akan dilakukan setelah gejala-gejala sosial itu dapat dipastikan sebagai masalah sosial.

Ada beberapa metode untuk menanggulangi masalah sosial, yaitu sebagai berikut.

1. *Metode coba-coba (trial and error methods)*, yaitu cara penanggulangan masalah sosial yang paling sederhana. Metode ini sering digunakan untuk menanggulangi masalah sosial pada masyarakat yang masih tergolong sederhana. Kadang-kadang dilakukan dengan bantuan seorang dukun atau dengan membuat sesajen yang diletakkan pada tempat-tempat tertentu. Ada pula sebagian masyarakat yang melakukan upacara adat tolak bala, yang dimaksudkan agar bahaya dan berbagai penyakit tidak melanda kehidupan masyarakat setempat.
2. *Metode analisis*, yaitu cara penanggulangan masalah sosial dengan melakukan penelitian-penelitian secara ilmiah. Para penelitiannya melakukan pengumpulan data sebagai dasar untuk mencari penyebab timbulnya masalah sosial yang sedang terjadi atau secara langsung menerapkan hasil keputusan pemikiran-pemikiran tertentu untuk *meniadakan masalah sosial tersebut*. Metode ini tidak semata-mata mendasarkan pada kenyataan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan cara-cara yang bersifat tradisional. Metode ini berusaha menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebab jika tidak, akan sulit dapat bekerja sama dengan masyarakat desa, lantaran mereka biasanya bersifat konservatif. Penerapan metode ini selalu disertai oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap nilai-nilai sosial beserta adat istiadat masyarakat setempat agar terdapat keseimbangan dan kerja sama yang harmonis

dalam usaha penanggulangan masalah-masalah sosial tersebut.

3. *Perencanaan sosial*, yaitu suatu metode yang didasarkan pada fakta-fakta menurut hasil penelitian-penelitian ilmiah dan bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman praktis atau penelitian-penelitian tanpa perhitungan. Pemikirannya adalah usaha yang berorientasi pada masa depan dengan ukuran waktu dan biaya yang telah ditetapkan. Perencanaan sosial berarti usaha memperhitungkan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih serasi sesuai dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Syani, 1987). Secara sosiologis, perencanaan sosial pada dasarnya merupakan alat untuk mempermudah usaha manusia menuju kepada suatu kemajuan sosial (*social progress*). Untuk menuju ke arah kemajuan tersebut, tidak hanya tergantung pada campur tangan pemerintah, tetapi lebih diutamakan dukungan masyarakat, oleh karena masyarakatlah yang langsung terlibat dalam setiap proses perubahan-perubahan masyarakat itu. Suatu perencanaan sosial tidak akan banyak berarti jika anggota-anggota masyarakat tidak mampu berperan aktif dan tidak dapat bekerja sama dalam menanggulangi masalah sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sosial dimaksudkan sebagai usaha untuk mengurangi atau meniadakan masalah-masalah sosial yang timbul akibat dari ketimpangan-ketimpangan atau ketidaksesuaian antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan aspek-aspek kebudayaan non material dalam masyarakat.

D. Tokoh-Tokoh dan Pandangan Para Perintis Sosiologi

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai tokoh tertentu yang dianggap sebagai perintis. Ilmu pengetahuan alam mempunyai Sir Izaak Newton; psikologi mempunyai Freud, Jung. Sosiologi pun mengenal sejumlah orang yang dianggap sebagai perintisnya.

Biasanya para ahli sosiologi membedakan antara para perintis awal yang hidup pada abad ke-18 dan 19, dan para tokoh sosiologi masa kini yang hidup di abad ke-20. Orang yang oleh Lewis Coser dianggap sebagai pemuka pemikiran *sociologi-masters of sociological thought* ialah Saint-Simon, Comte, Spencer, Durkheim, Weber, Marx, Sorokin, Mead, Cooley. Doyle Paul Johnson menyebutkan Comte, Marx, Durkheim, Weber, Simmel sebagai tokoh sosiologi klasik (*classical founders*) dan orang seperti Mead, Goffman, Homans Thibaut dan Kelly, Blau, Parsons, Merton, Mills, Dahrendorf, Coser, Collins sebagai penganut perspektif masa kini (*contemporary perspectives*). Dalam kajiannya terhadap sejarah sosiologi L. Laeyenderker menyebutkan nama sejumlah tokoh sosiologi seperti Saint Simon, Comte, Spencer, Marx,

Durkheim, Weber, Mannheim, Cooley, Thomas, Mead (Final Lacyendccker, 1983). Alex Inkeles berpendapat bahwa perintis utama sosiologi terdiri atas Comte, Spencer, Durkheim, dan Weber (lihat Inkeles, 1965).

Pembahasan ini akan dimulai dengan uraian mengenai beberapa sumbangan penting para perintis awal bagi perkembangan sosiologi sebagai ilmu. Pemahaman mengenai sumbangan pikiran para perintis awal ini perlu, karena antara pemikiran para perintis awal dan pemikiran para tokoh sosiologi masa kini terdapat suatu kcsinambungan-suatu benang merah. Setelah mempelajari pokok pikiran para perintis awal kita akan menyadari bahwa sebagian besar konsep dan teori sosiologi masa kini berakar pada sumbangan pikiran para tokoh klasik. Pemikiran tokoh masa kini seperti Mills, Dahrendorf, Coser dan Collins, misalnya, memperlihatkan pengaruh Marx yang hidup di abad ke-19; pemikiran Homans dan Blau menampilkan pengaruh pemikiran tokoh utilitarianisme seperti Bentham, dan pemikiran Merton dan Parsons menunjukkan pengaruh pemikiran Durkheim.

1. Auguste Comte (1798-1857) : Statika Sosial dan Dinamika Sosial

Perkataan sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, seorang ahli filsafat kebangsaan Prancis. Oleh karena itu, tokoh ini lazim dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Beberapa sumbangan penting Comte terhadap sosiologi, antara lain sebagai berikut.

- a. Ia mengatakan bahwa ilmu sosiologi harus didasarkan pada pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis secara sistematis. Objek yang dikaji pun harus berupa fakta (bukan harapan atau prediksi). Jadi, harus *objektif* harus pula bermanfaat serta mengarah kepada kepastian dan kecermatan.
- b. Ia menyumbangkan pemikiran yang mendorong perkembangan sosiologi yang dikenal dengan hukum *kemajuan manusia* atau *hukum tiga jenjang*. Ia mengatakan, bahwa dalam menjelaskan gejala alam dan gejala sosial, manusia akan melewati tiga jenjang berikut ini.
 - 1) Jenjang Teologi : Segala sesuatu yang dijelaskan dengan mengacu kepada hal-hal yang bersifat adikodrati.
 - 2) Jenjang Metafisika : Pada jenjang ini manusia memahami sesuatu dengan mengacu kepada kekuatan-kekuatan metafisik atau hal-hal yang abstrak.
 - 3) Jenjang Positif : Gejala alam dan sosial di jelaskan dengan mengacu kepada deskripsi ilmiah (jenjang ilmiah).

Karena memperkenalkan metode positif, Comte dianggap sebagai perintis positivisme. Ciri metode positif ialah objek yang dikaji harus berupa fakta dan kajian harus bermanfaat serta mengarah pada kepastian dan kecermatan. Sarana yang menurut Comte dapat

digunakan untuk melakukan kajian ialah: (1) pengamatan, (2) perbandingan, (3) eksperimen, atau (4) metode historis. Mengapa Comte berpandangan bahwa sosiologi harus menggunakan metode positif? Karena dalam pandangannya, sosiologi harus merupakan ilmu yang sama ilmiahnya dengan ilmu pengetahuan alam yang mendahuluinya. Menurut hematnya, kegiatan kajian sosiologi yang tidak menggunakan metode pengamatan, perbandingan, eksperimen ataupun historis bukanlah kajian ilmiah, melainkan hanya renungan atau khayalan. belaka.

- c. Ia mengatakan bahwa sosiologi merupakan 'ratu' ilmu-ilmu social dan menempati peringkat teratas dalam hierarki ilmu-ilmu di atas astronomi, fisika, ilmu kimia, dan biologi (Cosser, 1977).
- d. Ia membagi sosiologi ke dalam kedua bagian besar, yaitu statika sosial (*social statics*) yang mewakili stabilitas tatanan sosial dan kemantapan serta dinamika sosial (*social dynamirs*) yang mewakili kemajuan dan perubahan sosial. Comte menyatakan bahwa hubungan antara statika sosial dengan dinamika sosial dapat disamakan dengan hubungan antara anatomi dan fisiologi.

Hingga kini pun, klasifikasi Comte ini masih tetap relevan. Dalam literatur sosiologi, *social statics* banyak dikaji dengan melihat tatanan sosial yang ada, misalnya kajian terhadap struktur sosial suatu masyarakat, hubungan antara suatu institusi dan institusi lain, fungsi masing-masing institusi, dan sebagainya. Namun, ada pula ahli sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada *social dynamics*, mengkaji perubahan sosial, misalnya perubahan sosial yang melanda negara baru setelah berakhirnya Perang Dunia II, arah perubahannya, dampaknya, dan sebagainya.

2. Karl Marx (1818-1883) : Kelas Sosial

Ia mengembangkan konsep sejarah perjuangan kelas, yaitu lahirnya kelompok borjuis (kelompok yang menguasai alat-alat produksi) dan kelas proletar (kelompok rakyat jelata yang tidak memiliki alat-alat produksi). Menurut Marx, kelompok proletar akan memberontak melawan kelompok borjuis, kemudian melahirkan sesuatu masyarakat tanpa kelas.

Meskipun ramalan Marx tidak pernah terwujud, namun pemikiran Marx mengenai stratifikasi sosial dan konflik tetap berpengaruh terhadap pemikiran sejumlah besar ahli sosiologi. Sebagaimana para tokoh sosiologi lainnya, pemikiran Marx pun dilatarbelakangi dan diilhami oleh perubahan sosial besar yang melanda Eropa Barat sebagai dampak perkembangan pembagian kerja, khususnya yang terkait dengan kapitalisme.

3. Herbert Spencer (1820-1903) : Materi Sosiologi

Herbert Spencer adalah orang Inggris yang menguraikan materi sosiologi secara rinci dan sistematis. Menurutnya, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Termasuk pula asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan pada tahun 1876, ia menentang sebuah teori tentang "evolusi sosial" yang hingga kini masih dianut, walaupun di sana-sini ada perubahan. Ia juga menerapkan secara analog teori Darwin mengenai "teori evolusi" terhadap masyarakat manusia, ia yakin, bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitive ke masyarakat industri.

4. Emile Durkheim (1858-1917) : Fakta Sosial

Emile Durkheim adalah salah seorang pelopor perkembangan sosiologi. Menurut Durkheim, sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial. Kalau Comte dan ahli sosiologi lain yang mengikutinya membagi sosiologi menjadi statika sosial dan dinamika sosial, maka dalam majalah *L'Année Sociologique*, Durkheim dan rekan-rekannya memperkenalkan pembagian sosiologi berdasarkan pokok bahasannya. Sosiologi mereka klasifikasikan menjadi tujuh bagian.

1. Sosiologi Umum, yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia.
2. Sosiologi Agama.
3. Sosiologi Hukum dan Moral, yang mencakup organisasi politik, sosial, perkawinan, dan keluarga.
4. Sosiologi tentang Kejahatan
5. Sosiologi Ekonomi yang mencakup ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja.
6. Sosiologi masyarakat, yang mencakup masyarakat perkotaan dan pedesaan.
7. Sosiologi Estetika

Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat manusia memerlukan solidaritas, solidarkas. Ia membedakan antara dua tipe utama solidaritas: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan. Menurut Durkheim, solidaritas mekanik dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang dinamakannya "segmental". Pada masyarakat seperti ini belum terdapat pembagian kerja yang berarti, apa yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat biasanya dapat dilakukan pula oleh orang lain. Dengan demikian, tidak terdapat saling

ketergantungan antara kelompok berbeda, karena masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok pun terpisah satu dengan yang lain. Tipe solidaritas yang didasarkan atas kepercayaan dan setia kawan ini diikat oleh apa yang oleh Durkheim dinamakan *conscience collective* (hati nurani kolektif) suatu sistem kepercayaan dan perasaan yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat.

5. Max Weber (1864-1920) ; Tindakan Sosial

Menurut Max Weber, sosiologi sebagai ilmu berusaha memberikan pengertian adalah tentang aksi-aksi sosial. Ia memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Karya Max Weber tentang perkembangan sosiologi, misalnya analisis tentang wewenang, birokrasi, sosiologi agama, organisasi-organisasi ekonomi, dan sebagainya.

Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Ia belajar ilmu hukum di Universitas Berlin dan Universitas Heidelberg dan pada tahun 1889 menulis disertasi berjudul *Contribution to The History of Medieval Business Organizations*. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengawali kariernya sebagai dosen ilmu hukum mula-mula di Universitas Berlin, kemudian di Universitas Freiburg, dan setelah itu di Universitas Heidelberg. Menjelang akhir masa hidupnya, Weber mengajar di Universitas Wina dan Universitas Munich. Selain mengajar, ia pun berperan sebagai konsultan serta peneliti. Semasa Perang Dunia I, ia mengabdikan diri di angkatan bersenjata Jerman.

Weber merupakan seorang ilmuwan yang sangat produktif dan menulis sejumlah buku dan makalah. Salah satu bukunya yang terkenal ialah *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904). Dalam buku ini ia mengemukakan tesisnya yang terkenal mengenai keterkaitan antara etika Protestan dengan munculnya kapitalisme di Eropa Barat. Menurut Weber, muncul dan berkembangnya kapitalisme di Eropa Barat berlangsung secara bersamaan dengan perkembangan sekte Calvinisme dalam agama Protestan. Argumen Weber adalah sebagai berikut: ajaran Calvinisme mengharuskan umatnya untuk menjadikan dunia tempat yang makmur sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan kerja keras. Karena umat Kalvinis bekerja keras, antara lain dengan harapan bahwa kemakmuran merupakan tanda baik yang mereka harapkan dapat menuntun mereka ke arah surga, maka mereka pun menjadi makmur.

Namun, keuntungan yang mereka peroleh melalui kerja keras ini tidak dapat digunakan untuk berfoya-foya atau bentuk konsumsi berlebihan lain, karena ajaran Calvinisme mewajibkan hidup sederhana dan melarang segala bentuk kemewahan dan foya-foya. Sebagai akibat

yang tidak direncanakan dari perangkat ajaran Calvinisme ini, maka para penganut agama ini menjadi semakin makmur karena keuntungan yang mereka peroleh dari hasil usaha tidak dikonsumsi, melainkan ditanamkan kembali dalam usaha mereka. Melalui cara inilah, menurut Weber, kapitalisme di Eropa Barat berkembang.

Sumbangan Weber yang tidak kalah pentingnya ialah kajiannya mengenai konsep dasar sosiologi (Weber, 1964). Dalam uraian ini, Weber menyebutkan pula bahwa sosiologi ialah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial. Ini nampak dari definisi berikut ini: "*Sociology... is a science which attempts the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and effects* (Weber, 1964: 88). Di kemudian hari, tulisan ini menjadi acuan bagi dikembangkannya teori sosiologi yang membahas interaksi sosial. Namun, pendekatan sosiologi yang diusulkan Weber dalam tulisan ini ternyata tidak menjadi tuntutan baginya untuk melihat masyarakat.

Pandangan Ahli Sosiologi Masa Kini

C. Wright Mills: *The Sociological Imagination*

Pandangan para ahli sosiologi abad ke-20 tentang tujuan sosiologi ini, Seorang ahli sosiologi C. Wright Mills, berpandangan bahwa untuk dapat memahami apa yang terjadi di dunia maupun apa yang ada dalam diri sendiri manusia memerlukan apa yang dinamakan imajinasi sosiologi (*sociological imagination*). Menurut Mills *sociological imagination* ini akan memungkinkan kita untuk memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya.

Mills berpendapat bahwa untuk melakukan *sociological imagination* diperlukan dua peralatan pokok; apa yang dinamakannya *personal troubles of milieu* dan *public issues of social structure* (Mills, 1978:8). Menurutnya *troubles* (kesusahan) berlangsung dalam cirri individu dan dalam jangkauan hubungan langsungnya dengan orang lain. *Trouble* merupakan masalah pribadi dan merupakan ancaman terhadap nilai yang didukung pribadi. *Issues* (isu), dipihak lain, merupakan hal yang berada diluar lingkungan setempat individu dan di luar jangkauan kehidupan pribadinya. Suatu *issue* merupakan suatu hal yang bersifat umum : suatu nilai yang didukung umum dirasa terancam. Contoh yang disajikan Mills tentang konsep *personal trouble* ialah suatu kota berpenduduk 100.000 jiwa yang hanya mempunyai seorang penganggur. Bagi penganggur tersebut pengangguran merupakan *personal trouble*-nya, dan untuk mengatasinya kita mempertimbangkan cirri dan ketrampilan individu yang bersangkutan serta kesempatan yang terbuka baginya. Namun bilamana dalam suatu kota berpenduduk 50 juta jiwa dijumpai 15

juta orang pengangur maka, menurut Mills, yang kita hadapi ialah suatu issue yang pemecahannya berada diluar ruang lingkup kesempatan yang tersedia bagi masing-masing individu yang bersangkutan

Pete Berger : Daya tarik Sosiologi

Dalam bukunya yang berjudul *Invitation to Sociology* (1978) Berger mengajak kita untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai sosiologi. Di sini kita tidak akan meliputi seluruh permasalahan yang dibahas Berger dan harus membatasi diri pada beberapa pokok bahasannya saja.

Berger mengawali tulisannya dengan mengajukan berbagai citra yang melekat pada ahli sosiologi (lihat Berger, 1978:11-36). Citra pertama, menurut Berger, ialah bahwa seorang ahli sosiologi ialah seseorang yang suka bekerja dengan orang lain, menolong orang, lain, melakukan sesuatu untuk orang lain. Citra berikut ialah bahwa ahli sosiologi adalah seseorang teoretikus di bidang pekerjaan sosial. Citra lain menggambarkan ahli sosiologi sebagai seorang yang melakukan reformasi social seorang perekayasa sosial. Ahli sosiologi sebagai seseorang yang pkerjaannya mengumpulkan data statistik mengenai perilaku manusia. Dalam gambaran lain, ahli sosiologi dianggap sebagai orang yang mencurahkan perhatiannya pada pengembangan metodologi ilmiah untuk dipakai dalam mempelajari fenomena manusia. Citra terakhir memandang ahli sosiologi sebagai seorang pengamat yang memelihara jarak seorang manipulator manusia.

Berger mengemukakan bahwa berbagai citra yang dianut orang tersebut tidak tepat, keliru, dan menyesatkan. Kegemaran menolong orang lain bukan ciri khas ahli sosiologi, meskipun di antara para ahli sosiologi tentu ada mempunyai watak demikian. Seorang ahli sosiologi bukan seorang pekerja sosial; pekerjaan sosial merupakan suatu praktik sedangkan sosiologi merupakan suatu usaha untuk memahami dengan berpegang pada nilai integritas ilmiah. Dengan alasan yang sama, citra mengenai ahli sosiologi sebagai perekayasa sosial pun ditolak Berger. Berger mengemukakan bahwa data statistik hanya menjadi sosiologi bila ditafsirkan secara sosiologis, sehingga menurutnya citra mengenai ahli sosiologi sebagai pengumpul data statistik mengenai perilaku manusia pun tidak tepat. Berger mengemukakan bahwa ahli sosiologi memang perlu memikirkan masalah metodologi namun tujuannya ialah untuk memahami masyarakat, seraya mengakui bahwa di antara ahli sosiologi memang ada yang terlalu menyibukkan diri dengan metodologi sehingga lupa pada masyarakat yang seharusnya dipelajarinya. Menurut Berger seorang ahli sosiologi pun bukan seorang pengamat tanpa kepedulian atau seorang manipulator tanpa hati nurani.

BAB III

INTERAKSI SOSIAL

A. Individu dan Masyarakat

A.1. Pengertian Individu

Individu berasal dari kata *individum* (latin), yaitu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis, artinya manusia yang hidup berdiri sendiri, tidak mempunyai kawan (sendiri). Individu sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya selalu dilengkapi dengan kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun.

- a. *Raga*, merupakan bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, sekalipun dengan ciri dan hakikat yang sama.
- b. *Rasa*, merupakan perasaan individu yang dapat menangkap objek gerakan dari benda-benda isi alam semesta, seperti merasakan panas, dingin, atau merasakan makanan yang lezat. Perasaan juga dapat dikembangkan menjadi senang dengan keindahan dan sebaliknya.
- c. *Rasio*, atau akal pikiran merupakan kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri tiap individu.
- d. *Rukun*, atau pergaulan hidup merupakan bentuk sosialisasi dengan sesama manusia dan hidup berdampingan satu sama lain secara harmonis, damai dan saling melengkapi. Rukun ini merupakan perangkat individu yang dapat membentuk suatu kelompok sosial yang sering disebut sebagai masyarakat.

A.2. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab "*syaraka*" yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau "*musyaraka*" yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah "*society*", yang sebelumnya berasal dari kata latin "*socius*", berarti "kawan" (Koentjoroningrat, 1980). Pendapat sejenis juga terdapat dalam buku; *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, karangan Abdul Syani (1987), dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata *musyarak* (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Abdul Syani (1987), masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang dicandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dan adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. *Kedua*, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses-(nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antarmanusia, di dalamnya ada yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya.

Dari kedua cirri khusus yang dikemukakan di atas, berarti dapat diduga bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi cirri-ciri tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti *society*. Masyarakat dalam pengertian *society* terdapat interaksi social, perhitungan-perhitungan rasional dan like *interest*, hubungan-hubungan menjadi pamrih dan ekonomis.

Sementara itu, berlangsungnya suatu interaksi social dapat didasarkan pada berbagai factor, antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah maupun berkaitan.

a) *Imitasi*

Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Dalam interaksi sosial, imitasi dapat bersifat positif, artinya imitasi tersebut mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun, imitasi juga dapat berpengaruh negatif apabila yang dicontoh itu adalah perilaku-perilaku menyimpang. Selain itu, imitasi juga dapat melemahkan atau mematikan kreativitas seseorang. Misalnya, anak yang terus-menerus meniru dan mengikuti perintah atau kehendak orang lain, akhirnya tidak dapat mengembangkan daya kreativitasnya sendiri.

b) *Sugesti*

Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Sugesti terjadi karena pihak yang menerima anjuran tersebut

tergugah secara emosional dan biasanya emosi ini menghambat daya pikir rasionalnya. Proses sugesti lebih mudah terjadi apabila orang yang memberikan pandangan itu adalah orang yang berwibawa dan bersifat otoriter. Mungkin juga bahwa sugesti terjadi kalau yang memberikan pandangan atau sikap itu adalah kelompok atau masyarakat.

c) *Identifikasi*

Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi lebih mendalam dari imitasi, karena dengan identifikasi, seseorang mencoba menempatkan diri dalam keadaan orang lain, "mengidentikkan" dirinya dengan orang lain, bahkan menerima kepercayaan dan nilai yang dianut orang lain menjadi kepercayaan dan nilainya sendiri. Proses identifikasi dapat membentuk kepribadian seseorang, misalnya seseorang merasa sedih melihat orang lain yang mengalami musibah atau merasa iba melihat orang cacat, atau seseorang pemuda mengikuti mode potongan rambut panjang karena menurutnya hal itu sudah menjadi mode kesukaan para bintang film terkenal.

d) *Simpati*

Simpati adalah perasaan "tertarik" yang timbul dalam diri seseorang dan membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Misalnya, seseorang merasa sedih melihat penderitaan orang lain yang ditimpa musibah maka ia akan memproduksi dirinya sendiri ke dalam perasaan pihak lain, berupa rasa iba atau rasa sayang. Simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada perasaan pihak lain. Dalam hal tertentu, simpati mirip dengan identifikasi, yakni kecenderungan menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Perbedaannya adalah, bahwa di dalam simpati, perasaan memegang peranan penting, walaupun dorongan utama adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya tanpa memandang status atau kedudukan. Sedangkan identifikasi didorong oleh keinginan untuk menjadi "sama" dengan pihak lain yang dianggap mempunyai kelebihan atau kemampuan tertentu yang layak ditiru. Proses simpati akan dapat berkembang kalau terdapat factor saling mengerti.

B. Pengertian Interaksi Sosial

Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam hidup bersama antara manusia dan manusia atau manusia dan kelompok tersebut terjadi "hubungan" dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu manusia

ingin menyampaikan maksud, tujuan dan keinginannya masing-masing. Sedangkan untuk mencapai keinginan itu harus diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal-balik. Hubungan inilah yang disebut interaksi. Interaksi terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari individu-individu yang lain. Karena itu, interaksi terjadi dalam suatu kehidupan sosial.

Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerja sama, tetapi bias juga berbentuk tindakan persaingan, pertikaian, dan sejenisnya.

Interaksi sosial merupakan hubungan yang tertata dalam bentuk tindakan-tindakan yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bila interaksi itu berdasarkan pada tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka kecil kemungkinan hubungan tersebut berjalan lancar. Misalnya, apabila kita mengutarakan sesuat dengan hormat dan sopan terhadap orang tua, maka kita akan dilayani dengan baik. Sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sopan dan tidak hormat terhadap orang tua, maka mereka akan marah, yang akhirnya hubungan antara kita dan orang tua tersebut tidak lancar.

C. Ciri-ciri Interaksi Sosial

Interaksi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Ada pelaku dengan Jumlah lebih dari satu orang.
- b. Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
- c. Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung.
- d. Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat.

D. Hubungan Antara Tindakan Sosial dan Interaksi Sosial

Pengertian tindakan sosial dan interaksi sosial di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa keduanya mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Tindakan sosial adalah perbuatan yang dipengaruhi oleh orang lain untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, sedangkan interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan individu-individu. Terjadinya hubungan timbal balik ini disebabkan oleh adanya tindakan (aksi) dan tanggapan (reaksi) antara dua pihak. Tindakan merupakan syarat mutlak terbentuknya hubungan timbal balik atau interaksi sosial.



E. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontrak sosial (*social contact*) dan komunikasi (*communication*). Kontrak sosial merupakan usaha pendekatan pertemuan fisik dan rohaniah. Kontak sosial dapat bersifat primer (berjumpa face to face) dan dapat sekunder (berhubungan melalui media komunikasi, baik perantara orang maupun media benda, surat kabar, TV, radio).

Komunikasi merupakan usaha penyampaian informasi kepada manusia lainnya. Tanpa komunikasi tidak mungkin terjadi proses interaksi sosial.

Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Bentuk interaksi sosial dapat berupa sebagai berikut.

- a. Kerja sama (*cooperation*)
- b. Akomodasi (*accommodation*)
- c. Persaingan (*competition*)
- d. Pertikaian (*conflic*)

Konflik selalu menuju suatu penyelesaian, namun dalam prosesnya dapat berkondisi sementara, yang disebut akomodasi (*accommodation*). Ada yang menganggap akomodasi sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial.

a. Kerja Sama (*Cooperation*)

Bentuk dan pola kerja sama dapat dijumpai dalam semua kelompok sosial. Kebiasaan kerja sama dimulai dari semasih kanak-kanak, berupa permainan hingga dewasa dalam segala bentuk usaha guna mencapai tujuan bersama. Kerja sama timbul karena orientasi orang terhadap kelompoknya, maka harus ada kondisi pembagian kerja yang serasi dan imbalan yang jelas. Kerja sama akan bertambah kuat apabila ada ancaman dari luar atau sesuatu yang menyinggung nilai kesetiaan, adat istiadat dari kelompok tersebut. Masyarakat yang menjunjung tinggi atau menempatkan kerja sama dalam sistem nilai sosialnya sering menjadikan warganya kurang kreatif atau tidak berinisiatif karena selalu mengharap atau mengandalkan bantuan rekannya.

Ada tiga bentuk kerja sama/yaitu sebagai berikut.

1. *Bargaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi.
2. *Cooptation*, yaitu proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan suatu organisasi guna menghindari guncangan stabilitas organisasi tersebut (saling mendukung).
3. *Coalition*, yaitu kombinasi dari dua organisasi yang mempunyai tujuan sama sehingga bersifat kooperatif. Jika kerja sama itu berdasarkan bagi hasil, disebut *joint-venture*.

b. Akomodasi (*Accommodation*)

Akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu menunjukkan pada suatu keadaan dan untuk menunjukkan pada suatu proses. Akomodasi sebagai keadaan berarti kenyataan adanya suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antara orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia, sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Akomodasi sebagai proses menunjukkan pada usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan.

Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan keperibadiannya. Tujuan akomodasi adalah untuk mengurangi pertentangan manusia akibat perbedaan paham, untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan, usaha untuk memungkinkan adanya kerja sama antarkelompok sosial, dan usaha untuk melebur antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah. Bentuk-bentuk akomodasi sebagai proses adalah sebagai berikut.

- 1) *Coertion*, ialah akomodasi yang dilaksanakan karena paksaan, misalnya perbudakan dalam masyarakat.
- 2) *Compromise*, suatu pihak bersikap untuk bersedia merasakan dan mengerti keadaan, pihak lainnya dan sebaliknya, misalnya beberapa partai politik sadar bahwa mereka mempunyai kekutan yang sama dalam suatu pemilihan umum.
- 3) *Mediation*, melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah secara damai dengan peranannya sebagai mediator.
- 4) *Conciliation*, suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih guna tercapainya tujuan bersama, misalnya beberapa unsur dalam panitia penyelesaian masalah perburuhan.
- 5) *Toleration*, suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal bentuknya, didasari oleh watak manusia yang tidak berkeinginan munculnya konflik.

c. Persaingan (*Competition*)

Persaingan merupakan proses sosial, di mana seseorang atau kelompok sosial bersaing memperebutkan nilai atau keuntungan bidang kehidupan melalui cara-cara menarik perhatian publik. Persaingan dapat bersifat pribadi dan dapat berupa kelompok atau organisasi. Bentuk persaingan dapat berupa sebagai berikut.

- 1) *Persaingan ekonomi*, yaitu usaha memperebutkan barang dan jasa dari segi mutu, jumlah, harga, dan pelayanan. Kadang kala

persaingan ekonom berlangsung tidak sehat sehingga malah merugikan pihak yang bersaing, karena biaya sering bertambah.

- 2) *Persaingan kebudayaan*, yaitu usaha memperkenalkan nilai-nilai budaya agar diterima dan dianut. Persaingan kebudayaan dapat di bidang keagamaan, pendidikan/ peradilan/ kesenian, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 3) *Persaingan status sosial*, yaitu usaha mencapai dan memperebutkan kedudukan dan peranan yang terpendang, baik oleh perorangan maupun oleh kelompok sosial. Kedudukan dan peranan apa yang dikejar sangat bergantung pada nilai apa yang paling dihargai masyarakat pada suatu masa tertentu.

Persaingan ras, yaitu persaingan kebudayaan khas yang diwakili ciri ras selaku perlambang sikap beda budaya. Hal ini terjadi karena keadaan badaniah yang tampak, lebih jelas terlihat daripada nilai budaya yang dianutnya.

d. *Pertikaian (Conflict)*

Pertikaian merupakan proses sosial di mana seseorang atau kelompok sosial berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang lawannya dengan ancaman atau kekerasan. Pertikaian terjadi karena perbedaan dipertajam oleh emosi/perasaan, apalagi didukung pihak ketiga. Adapun sebab-sebabnya ialah sebagai berikut.

- 1) Perbedaan budaya yang melatarbelakangi sikap atau pendirian kelompok yang menyebabkan pertentangan antarkelompok.
- 2) Perbedaan pendirian atau sikap yang tidak terkendali oleh akal.
- 3) Bentrokan kepentingan, misalnya bidang ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 4) Perubahan sosial yang diiringi perubahan sikap tentang nilai tertentu sebagai akibat perubahan atau disorganisasi.

Dalam setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan, namun setiap kali terjadi konflik dapat menjadi reda jika ada sikap toleransi dan interaksi sosial guna memelihara hubungan. Sebaliknya, jika benih pertentangan dibiarkan berkembang, maka keutuhan kelompok sosial akan pudar, sebab segala perasaan tidak puas semakin meluap dan disusul perang terbuka. Secara umum, konflik merupakan wujud kegairahan sosial, di mana konflik biasanya menghasilkan keseimbangan dan penyesuaian menyusul suatu perubahan.

Dalam kelompok sosial berstruktur terbuka, misalnya seminar, sengaja diciptakan konflik agar diperoleh berbagai masukan. Hasil dari suatu konflik dapat berupa:

- Solidaritas bertambah,
- persatuan retak atau hancur,

- perubahan kepribadian atau sikap,
- korban jiwa dan harta (perang),
- akomodasi atau dominasi.

Bila kekuatan pihak yang bertikai berimbang dan disusul perubahan sikap dan penyesuaian diri pada kondisi perubahan, maka disebut akomodasi. Jika kekuatan tidak seimbang, lalu pihak terkuat atau terbesar memaksakan pendiriannya, maka disebut dominasi. Konflik dapat berupa:

- konflik pribadi,
- konflik rasial dan kebudayaan,
- konflik antarkelas sosial,
- konflik politik dan pengaruh,
- konflik internasional.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik seseorang maupun kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya dapat berlangsung interaksi sosial. Taraf lanjutan disebut asimilasi. Meskipun berbeda budaya, namun karena interaksi sosial yang intensif dalam kurun waktu cukup lama dapat mengakibatkan perubahan bersama di mana mereka masing-masing saling menyesuaikan diri. Terjadi proses pengurangan perbedaan yang akhirnya merasa tidak ada perbedaan. Batas nilai antarkelompok sosial itu hilang dan keduanya melebur menjadi satu kelompok sosial.

Faktor yang mendukung proses asimilasi ialah:

- sikap toleransi dan menghargai kebudayaan orang lain,
- adanya unsur persamaan dalam nilai budaya,
- peluang bidang ekonomi yang berimbang,
- sikap terbuka penguasa dan tokoh masyarakat,
- perkawinan campuran (*amalgation*),
- adanya musuh bersama dari luar.

Interaksi sosial dapat mengarah kepada proses asimilasi. Hal ini dapat berupa:

- interaksi sosial yang bersifat saling ada pendekatan,
- interaksi sosial yang bersifat langsung primer,
- interaksi sosial yang lancar dan tidak ada hambatan atau batas,
- interaksi sosial yang sering, intensif, dan sehari-hari.

Apabila asimilasi antara dua kelompok sosial yang berbeda budaya berlangsung sedemikian rupa sehingga saling menerima unsur budaya lainnya menjadi adat istiadat baru, keadaan ini disebut akulturasi. Jadi, dalam akulturasi, unsur budaya lain masuk atau diterima menjadi seolah-olah milik sendiri atau budaya sendiri.

BAB IV

KEBUDAYAAN

A. Definisi Kebudayaan

Ada suatu kesalahan umum yang terdapat dalam masyarakat yang beranggapan bahwa ada masyarakat yang memiliki kebudayaan sedangkan yang lain tidak. Secara sosiologis semua manusia dewasa yang normal pasti memiliki kebudayaan. Kebudayaan bisa diartikan sebagai keseluruhan tingkah-laku dan kepercayaan yang dipelajari yang merupakan ciri anggota suatu masyarakat tertentu. Kata kunci dari definisi di atas adalah dipelajari, yang membedakan antara kebudayaan dengan tindak-tanduk yang merupakan warisan biologis manusia.

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti *cinta, karsa, dan rasa*. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta *budhayah* yaitu bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultuur*, dalam bahasa Latin, berasal dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani).

Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Berikut pengertian budaya atau kebudayaan dari beberapa ahli:

- 1) E. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lamserta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- 2) R. Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.
- 3) Koentjaraningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar.
- 4) Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.
- 5) Herkovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.

Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non-

material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan *evolusionisme*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dan tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

Secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia dan meliputi:
 - a) kebudayaan materiil (bersifat jasmaniah), yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain;
 - b) kebudayaan nonmateriil (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.
2. Kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar.
3. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat, kemungkinannya sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa kebudayaan, tidak mungkin manusia (secara individual maupun kelompok) dapat mempertahankan kehidupannya.

Jadi, kebudayaan adalah kebudayaan manusia. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan.

B. Unsur Pokok Kebudayaan

Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telaahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Herskovits mengajukan adanya empat unsur pokok dalam kebudayaan.

1. Alat-alat teknologi.
2. Sistem ekonomi.
3. Keluarga.
4. Kekuasaan politik.

Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai salah seorang pelopor teori fungsionalisme dalam antropologi menyebut adanya unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut.

1. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya.
2. Organisasi ekonomi.
3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan; dan perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.

4. Organisasi millter (Soerjono Soekanto, 1982).

Kluckhohn dalam karangannya yang berjudul *Universal Categories of Culture* (1953), menguraikan pandangan para sarjana antropologi yang berbeda-beda beserta dengan alasan-alasan perbedaan tersebut tentang kebudayaan yang dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan tersebut terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia di mana pun berada. Selanjutnya, dari kerangka unsur-unsur kebudayaan yang disusun oleh sarjan-sarjana antropologi tersebut, Koentjaraningrat (1980) berpendapat, bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal.

1. Bahasa.
2. Sistem pengetahuan.
3. Organisasi sosial.
4. Sistem peralatan hidup dan reknologi.
5. Sistem mata pencaharian hidup.
6. Sistem religi.
7. Kesenian.

Koentjaraningrat (1987) kemudian mengemukakan ketujuh aspek kebudayaan tersebut dengan susunan sebagai berikut.

1. Sistem religi dan upacara keagamaan.
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan.
3. Sistem pengetahuan.
4. Bahasa.
5. Kesenin.
6. Sistem mata pencaharian hidup.
7. Sistem teknologi dan peralatan.

C. Hakikat dan Perwujudan Kebudayaan

Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan berbeda-beda, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan di mana pun berada.

1. Kebudayaan berwujud dan tersalurkan dari perikelakuan manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.

D. Perwujudan Kebudayaan

Beberapa ilmuwan seperti Talcott Parson (Sosiolog) dan al Kroeber (Antropolog) menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan secara tajam sebagai suatu sistem. Di mana wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Demikian pula J.J. Honigmann dalam bukunya *The World of Man* (1959) membagi budaya dalam tiga wujud, yaitu: *ideas, activities, and artifact*. Sejalan dengan pikiran para ahli tersebut, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud, yaitu:

- 1) *Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.*

Wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan, hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat atau adat istiadat, yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, tape, dan komputer. Kesimpulannya, budaya ideal ini adalah merupakan perwujudan dan kebudayaan yang bersifat abstrak.

- 2) *Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.*

Wujud tersebut dinamakan sistem sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto dan di-dokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Kesimpulannya, sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk perilaku dan bahasa.

- 3) *Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.*

Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan fisik. Di mana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik (aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat). Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto yang berwujud besar ataupun kecil. Contohnya: Candi Borobudur (besar), kain batik, dan kancing baju (kecil), teknik bangunan misalnya, cara pembuatan tembok dengan

fondasi rumah yang berbeda bergantung pada kondisi. Kesimpulannya, kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk materi/ artefak

E. Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat

Syani (2002) secara panjang lebar menjelaskan tentang fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Sebelumnya ia menjelaskan bahwa bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Kecuali itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas, untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

Karsa masyarakat, mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Karsa merupakan daya upaya manusia untuk melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Kebiasaan (*habit*) merupakan suatu perilaku pribadi. Pribadi berarti bahwa kebiasaan orang seseorang itu berada dari peri kebiasaan orang lain, walau misalnya mereka hidup dalam satu rumah. Jadi, setiap orang akan membentuk kebiasaan yang khusus bagi dirinya sendiri.

Kebiasaan tersebut menunjuk pada suatu gejala seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain yang semasyarakat. Bahkan, lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan.

Khususnya dalam mengatur hubungan antarmanusia, kebudayaan di namakan pula struktur normatif atau menurut istilah Ralp Linton, sebagai *desigs for living* (garis-garis atau petunjuk dalam hidup). Artinya, kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan :

1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian (*valuational elements*), misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan, dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan.

2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya (*precriptive elements*), seperti bagaimana orang harus berlaku.
3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (*cognitive elements*), seperti harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain.

F. Sistem Budaya dan Sistem Sosial

Sistem sosial dan sistem budaya merupakan bagian dari kerangka budaya. Kedua system tersebut secara analisis dapat dibedakan. Sistem sosial lebih banyak dibahas oleh ilmu sosiologi, sementara itu sistem budaya banyak dikaji dalam ilmu budaya.

Sistem diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Sistem mempunyai sepuluh ciri, yaitu Fungsi, satuan, batasan, bentuk, lingkungan, hubungan, proses, masukan, keluaran, dan pertukaran.

Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dan kebudayaan. Sistem budaya atau *cultural system* merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan tersebut tidak dalam keadaan berdiri sendiri, tetapi berkaitan dan menjadi suatu sistem. Dengan demikian, sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula adat istiadat. Adat istiadat mencakup sistem nilai budaya, sistem norma, norma-norma menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk norma agama.

Fungsi sistem budaya adalah menara dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui proses pembudayaan atau *institutionalization* (pelembagaan). Dalam proses ini, individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini dimulai sejak kecil, dimulai dan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, mula-mula meniru berbagai macam tindakan. Setelah itu, menjadi pola yang mantap dan mengatur tindakannya.

Sedangkan sistem sosial pertama kali diperkenalkan oleh Talcot Parsons. Konsep *struktur sosial* digunakan untuk menganalisis realitas sosial sehingga sistem sosial menjadi model analisis terhadap organisasi sosial. Konsep sistem sosial adalah alat bantu untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia. Model ini bertitik tolak dari pandangan bahwa kelompok manusia merupakan suatu sistem.

Parsons menyusun strategi untuk menganalisis fungsional, yang meliputi semua sistem sosial, termasuk hubungan berdua, kelompok kecil, keluarga, organisasi sosial, termasuk juga masyarakat secara keseluruhan. Ada empat unsur dalam sistem sosial, yaitu: (1) dua orang

atau lebih, (2) terjadi interaksi di antara mereka, (3) interaksi yang dilakukan selalu bertujuan, dan (4) memiliki struktur, simbol, dan harapan-harapan bersama yang dipedomannya (Sulaeman, 1998).

Lebih lanjut, Sulaeman mengutip pendapat Parsons, bahwa suatu sistem sosial akan dapat berfungsi apabila empat persyaratan di bawah ini terpenuhi. Keempat persyaratan itu meliputi berikut ini.

1. Adaptasi, menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.
2. Mencapai tujuan, merupakan persyaratan fungsional bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan umumnya.
3. Integrasi, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara para anggota dalam sistem sosial.
4. Pemeliharaan pola-pola tersembunyi, merupakan konsep *latent* (tersembunyi) pada titik berhentinya suatu interaksi akibat kejenuhan sehingga tunduk pada sistem sosial lainnya yang mungkin terlibat.

Lebih lanjut Parsons menjelaskan, bahwa dalam suatu sistem sosial terdapat 10 unsur yang membentuk kesempurnaan suatu sistem. Kesepuluh unsur itu, yaitu: (1) keyakinan, (2) perasaan, (3) tujuan sasaran cita-cita, (4) norma, (5) kedudukan peranan, (6) tingkatan, (7) kekuasaan atau pengaruh, (8) sanksi, (9) sarana atau fasilitas, dan (10) tekanan ketegangan.

G. Sistem Nilai

Sistem nilai adalah nilai inti (*core value*) dari masyarakat. Nilai inti ini diakui dan dijunjung tinggi; oleh setiap manusia di dunia untuk berperilaku. Sistem nilai ini menunjukkan tata tertib hubungan timbal balik yang ada di dalam masyarakat. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 1981). Sistem nilai budaya ini telah melekat dengan kuatnya dalam jiwa setiap anggota masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu yang singkat. Sistem budaya ini menyangkut masalah-masalah pokok bagi kehidupan manusia.

Sistem nilai budaya ini berupa abstraksi yang tidak mungkin sama persis untuk setiap kelompok masyarakat. Mungkin saja nilai-nilai itu dapat berbeda atau bahkan bertentangan, hanya saja orientasi nilai budayanya akan bersifat universal, sebagaimana Kluckhohn (1950) sebutkan.

Menurut Kluckhohn, sistem nilai budaya dalam masyarakat di mana pun di dunia ini secara universal menyangkut lima masalah pokok kehidupan manusia.

1. Hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrim. Ada yang berusaha untuk memadamkan

- hidup (nirvana = meniuip habis). Ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai sesuatu hal yang baik (mengisi hidup).
2. Hakikat karya manusia. Setiap manusia pada hakikatnya berbeda-beda, diantaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
 3. Hakikat waktu manusia. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda. Ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang.
 4. Hakikat alam manusia. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.
 5. Hakikat hubungan manusia. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal maupun secara vertikal (kepada tokoh-tokoh). Ada pula yang berpandangan individualistis (menilai tinggi kekuatan sendiri).

Berdasarkan hasil suatu penelitian, ada tiga pandangan dasar tentang makna hidup, yaitu (1) hidup untuk bekerja, (2) hidup untuk beramal serta berbakti, dan (3) hidup untuk bersenang-senang. Sedangkan makna kerja, yaitu untuk (1) mencari nafkah, mempertahankan hidup, (2) amal ibadah, (3) kehormatan, (4) kepuasan dan keserangan, serta (5) amal ibadah.

H. Perubahan Kebudayaan

Masyarakat dan kebudayaan di mana pun selalu dalam keadaan berubah, sekalipun masyarakat dan kebudayaan primitif yang terisolasi jauh dari berbagai masyarakat lainnya. Di sini ada tiga sebab terjadinya perubahan. *Pertama*, sebab yang berasal dari masyarakat dan kebudayaan itu sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi penduduk. *Kedua*, sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Masyarakat yang hidupnya terbuka yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain cenderung untuk berubah secara lebih cepat. *Ketiga*, adanya dimensi kebudayaan, penemuan-penemuan baru, khususnya teknologi dan inovasi

Dalam masyarakat maju, perubahan kebudayaan biasanya terjadi melalui penemuan (*discovery*) dalam bentuk ciptaan baru (*innovation*) dan melalui proses difusi. *Discovery* merupakan jenis penemuan baru

yang mengubah persepsi mengenai hakikat suatu gejala mengenai hubungan dua gejala atau lebih. *Invention* adalah suatu penciptaan bentuk baru yang berupa benda (pengetahuan) yang dilakukan melalui penciptaan dan didasarkan atas pengombinasian pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada mengenai benda dan gejala yang dimaksud.

Ada empat bentuk peristiwa perubahan kebudayaan. Pertama, *cultural lag*, yaitu perbedaan antara taraf kemajuan berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat. Dengan kata lain, *cultural lag* dapat diartikan sebagai bentuk ketinggalan kebudayaan, yaitu selang waktu antara saat benda itu diperkenalkan pertama kali dan saat benda itu diterima secara umum, sampai masyarakat menyesuaikan diri terhadap benda tersebut.

Kedua, *cultural survival*, yaitu suatu konsep untuk menggambarkan suatu praktik yang telah kehilangan fungsi pentingnya seratus persen, yang tetap hidup dan berlaku semata-mata hanya di atas landasan adat-istiadat semata-mata. *Cultural survival* pengertiannya; adanya suatu cara tradisional yang tak mengalami perubahan sejak dahulu hingga sekarang.

Ketiga, *cultural conflict* (pertentangan kebudayaan), yaitu proses pertentangan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Konflik budaya terjadi akibat terjadinya perbedaan kepercayaan atau keyakinan antara anggota kebudayaan yang satu dengan yang lainnya.

Keempat, *cultural shock* (guncangan kebudayaan), yaitu proses guncangan kebudayaan sebagai akibat terjadinya perpindahan secara tiba-tiba dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Ada empat tahap yang membentuk siklus *cultural shock*, yaitu (1) tahap inkubasi, yaitu tahap pengenalan terhadap budaya baru, (2) tahap kritis, ditandai dengan suatu perasaan dendam; pada saat ini terjadi korban *cultural shock*, (3) tahap kesembuhan, yaitu proses melampaui tahap kedua, hidup dengan damai, dan (4) tahap penyesuaian diri; pada saat ini orang sudah membanggakan sesuatu yang dilihat dan dirasakan dalam kondisi yang baru itu, sementara itu rasa cemas dalam dirinya sudah berlalu.

I. Gerak Kebudayaan

Seorang sosiologi dalam mempelajari kebudayaan sebagai hasil masyarakat tidak akan membatasi diri pada struktur kebudayaan tersebut, yaitu unsur-unsurnya yang statis, tetapi perhatiannya juga dicurahkan pada gerak kebudayaan tersebut. Dalam uraian-uraian sebelumnya telah diterangkan bahwa tak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi. Gerak manusia terjadi oleh sebab dia mengadakan.

hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antarkelompok manusia di dalam masyarakat. Perihal gerak tersebut akan diuraikan dalam satu bab tersendiri tentang proses-proses social. Di sini hanya akan disinggung garis besar "akulturasi" saja.

Akulturasi merupakan proses dimana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsure-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, dengan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan.

J. Norma-Norma Sosial

Seperti sebelumnya telah dikemukakan, bahwa nilai dan norma tidak dapat dipisahkan; nilai dan norma selalu berkaitan. Bedanya secara umum, norma mengandung sanksi yang relatif tegas terhadap pelanggarnya. Norma lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu ataupun kelompok masyarakat untuk mencapai ukuran nilai-nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan.

Alvin L. Berrrand mendefinisikan norma sebagai suatu standar-standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Ia mengatakan, bahwa norma sebagai suatu bagian dari kebudayaan nonmateri, norma-norma tersebut menyatakan konsepsi-konsepsi teridealisasi dari tingkah laku. Sudah barang tentu, memang benar bahwa tingkah laku erat hubungannya dengan apa yang menurut pendapat seseorang itu benar atau baik, walaupun begitu, tingkah laku yang sebenarnya dipandang sebagai suatu aspek dan organisasi sosial.

Untuk dapat membedakan kekuatan norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal ada empat bagian norma-norma sosial.

a. Cara berbuat (*usage*)

Norma yang disebut cara hanya mempunyai kekuatan yang dapat dikatakan sangat lemah dibanding norma yang lainnya. Cara lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungannya antara individu dengan individu dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya (norma), seseorang hanya mendapatkan sanksi-sanksi yang ringan, seperti berupa cemoohan atau celaan dari individu lain yang dihubungkannya. Perbuatan seseorang yang melanggar norma (dalam tingkatan cara) tersebut dianggap orang lain sebagai perbuatan yang tidak sopan, misalnya makan berdecak, makan sambil berdiri, dan sebagainya.

- b. Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folkways*)
Kebiasaan adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara. Kebiasaan merupakan suatu indikator. Kalau orang-orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang, maka bisa menjadi ukuran, misalnya bertutur sapa lembut (sopan santun) terhadap orang lain yang lebih tua atau mengucapkan salam setiap bertemu orang lain dan sebagainya.
- c. Tata kelakuan (*mores*)
Tata kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan mempunyai kekuatan pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi, berupa pemaksaan terhadap pelanggarnya untuk kembali menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum sebagaimana telah digariskan. Bentuk hukumannya biasanya dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari tempat tinggalnya.
- d. Adat istiadat (*custom*)
Adat istiadat adalah tata kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggarnya untuk menerima sanksi hukum, misalnya pemerkosaan, menjual kehormatan orang lain dengan dalih usaha mencari kerja, dan sebagainya. Sedangkan sanksi hukum informal biasanya diterapkan dengan kurang atau bahkan tidak rasional, yaitu lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.

Tingkat pengikatan norma ini. Bila kebiasaan (*folkways*) diterima sebagai aturan oleh masyarakat, disebut *mores* (tata kelakuan). Tata kelakuan bersifat sebagai pengawas di dalam masyarakat agar anggota masyarakat menyesuaikan tata kelakuannya dengan tata kelakuan (*mores*) yang terbentuk.

K. Kebudayaan sebagai Kontrol Masyarakat

Kebudayaan berperan pula sebagai kontrol masyarakat, yaitu cara yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota masyarakatnya yang menyimpang kepada tingkah laku normal. Kontrol sosial dijalankan dalam bentuk sanksi restitutif dan sanksi represif.

Sanksi restitutif adalah pemberitahuan atau teguran masyarakat kepada anggotanya yang menyimpang sehingga anggota tersebut mengetahui perbuatannya yang salah. Sanksi refresif adalah tindakan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat yang menyimpang tersebut secara setimpal, umpamanya pengusiran dari kampung tempat tinggalnya.

L. Kebudayaan Melindungi Manusia

Di samping berfungsi penting sebagai alat kontrol sosial, kebudayaan juga berfungsi untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia (Soekanto, 1990: 199).

1. Hakikat Kebudayaan

- a. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. Manusia beradaptasi, berintegrasi serta memanfaatkan alam sekitarnya dan mempergunakan kebudayaan. Manusia menciptakan kebudayaan dan dengan kebudayaan itu dia melanjutkan dan meningkatkan taraf kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

2. Perwujudan Kebudayaan

- a. Wujud kebudayaan merupakan (a) suatu kompleks dari ide-ide nilai-nilai, nama dan aturan, (b) suatu kompleks aktivitas manusia yang terpola, dan (c) sebagai benda materi hasil karya manusia. Wujud yang pertama merupakan wujud ideal kebudayaan, yang merupakan sistem budaya, wujud kedua menghasilkan sistem sosial, sedangkan wujud ketiga memberikan sistem budaya material.
- b. Ketiga lapisan wujud kebudayaan itu satu sama lain saling mendukung Sistem budaya material didukung oleh sistem sosial, sistem sosial didukung oleh sistem budaya, demikian juga sebaliknya.

BAB V

LEMBAGA SOSIAL

A. Definisi Lembaga Sosial

Istilah lembaga berasal dari kata *institution*, yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan (*established*). Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Berger mendefinisikan lembaga sebagai suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. W. Hamilton mendefinisikan lembaga sebagai tata cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan dijatuhi pelbagai derajat sanksi.

Banyak ahli berbeda pendapat mengenai definisi dari *social institution*, sebagian mendefinisikan sebagai lembaga sosial dan sebagian yang lain mendefinisikan sebagai lembaga kemasyarakatan. Berikut ini dikemukakan definisi *social institution* dari para ahli.

1. Polak menyatakan, bahwa lembaga atau *social institution* adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting.
2. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menerjemahkan *social institution* sebagai "lembaga kemasyarakatan".
3. MacIver dan Charles H. Page mendefinisikan, bahwa lembaga kemasyarakatan adalah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi.
4. Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari segi fungsinya, yaitu sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antarmanusia dan antara kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.
5. Sumner melihat lembaga kemasyarakatan dari segi kebudayaan, yaitu sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.

6. Soekanto mendefinisikan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Terlepas dari perbedaan istilah para ahli di atas, yang penting ialah bahwa *social/ institution* lebih menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga dalam kehidupan sosial masyarakat. Istilah lembaga sosial (*social institution*) di sini artinya, bahwa lembaga sosial lebih menunjuk pada suatu bentuk perilaku sosial anggota masyarakat dalam kehidupan bersama, sekaligus Juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut.

Norma masyarakat pada dasarnya digunakan untuk mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib. Norma yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusia disebut organisasi sosial (*social organization*). Norma-norma dalam kehidupan kemasyarakatan dikelompokkan berdasarkan pada keperluan pokok kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Keperluan hidup manusia dalam bermasyarakat banyak sekali, misalnya kebutuhan hidup kekerabatan. Kebutuhan jenis ini akan menimbulkan lembaga sosial, seperti keluarga batih, perkawinan, dan lain-lain. Kebutuhan terhadap mata pencaharian akan menimbulkan lembaga sosial, seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Kebutuhan terhadap pendidikan akan menimbulkan lembaga sosial, seperti lembaga keterampilan kerja (LPK), pesantren, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Kebutuhan terhadap rasa keindahan menimbulkan lembaga sosial, seperti kesusasteraan dan seni suara. Kebutuhan jasmaniah manusia menimbulkan lembaga sosial, seperti olahraga, pemeliharaan kesehatan, dan lain lain.

B. Latar Belakang Terjadinya Lembaga Sosial

Keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan, maka akan terhimpun menjadi lembaga sosial. Soekanto memberi batasan bahwa lembaga kemasyarakatan (*social institution*) merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan wujud konkret dari lembaga sosial antara lain asosiasi. Sebagai contoh, universitas merupakan lembaga sosial, sedangkan Universitas Gadjah Mada atau Universitas Indonesia merupakan contoh asosiasi.

Lembaga sosial dapat dikatakan tumbuh sejalan dengan kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena dalam hidupnya manusia memerlukan keteraturan. Oleh sebab itu, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya, dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan, tetapi lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual.

Hassan Shadily dalam bukunya *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, menjelaskan bahwa adat-adat yang oleh anggota golongan, terutama dalam masyarakat sederhana sangat keras dipertahankan dan pelanggaran dihukum mati, yaitu antara lain: *tabu*, larangan keras untuk menginjak suatu daerah yang dikatakan suci atau berbuat salah sesuatu perbuatan yang dilarang.

Perlu dipahami, bahwa dalam proses pelebagaan beberapa aspek, seperti aspek norma, ada kekuatan penjiwaan terhadap norma, di samping luasnya penyebaran penjiwaan norma tersebut bagi anggota-anggota masyarakat.

Menurut Johnson, bahwa suatu norma terlembaga (*institutionalized*) dalam suatu sistem sosial tertentu, paling sedikit memiliki tiga syarat, yakni:

1. bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma tersebut,
2. norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut,
3. norma tersebut bersanksi.

Menurut Soekanto, secara umum lembaga kemasyarakatan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi berikut.

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

C. Proses Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan

Proses pelebagaan (*institutionalization*) adalah proses yang terjadi pada suatu norma untuk menjadi bagian dari suatu lembaga sosial, sehingga di kenal, diakui, dimengerti, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat. Proses pelebagaan sebenarnya bisa berlangsung lebih jauh lagi hingga suatu norma sosial menjadi *internalized* (mendarah daging), yaitu suatu taraf perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

1. Norma-norma sosial

Pada mulanya norma sosial terbentuk secara tidak sengaja, dengan tujuan untuk mengatur hubungan antarmanusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Namun, dalam perkembangannya, norma-norma sosial ini dibentuk dengan sengaja. Hal ini lebih disebabkan karena semakin kompleksnya kebutuhan manusia, di mana norma-norma ini mempunyai kekuatan mengikat bagi anggota masyarakatnya. Kekuatan mengikat dari norma-norma ini berbeda-beda, ada yang lemah, sedang, dan ada juga yang kuat. Berdasarkan kekuatan mengikat anggotanya, norma-norma sosial dibedakan menjadi;

- a. cara (*usage*),
- b. kebiasaan (*folkways*),
- c. tata kelakuan (*mores*), serta
- d. adat-istiadat (*custom*).

Tata kelakuan (*mores*)

Tata kelakuan adalah kebiasaan yang merupakan tata perilaku dan juga sekaligus diterima sebagai norma pengatur yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, yang dilakukan masyarakat terhadap anggotanya.

Perbedaan *Usage* dan *Folkways*

Cara (<i>usage</i>)	Kebiasaan (<i>folkways</i>)
1. Norma ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih lemah jika dibandingkan dengan kebiasaan (<i>folkways</i>).	1. Norma ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara.
2. Cara menunjuk pada bentuk perbuatan.	2. Kebiasaan lebih menunjuk pada perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama.
3. Lebih menonjolkan hubungan antarindividu dalam masyarakat.	3. Lebih menonjolkan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian besar individu dalam masyarakat.
4. Sanksi terhadap pelanggaran norma berupa celaan dari individu yang berinteraksi dengannya.	4. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa celaan dari setiap anggota masyarakat.

Tata kelakuan mempunyai ciri-ciri, antara lain sebagai berikut.

- a. Memberi batas-batas pada perilaku individu. Hal ini karena tata kelakuan merupakan suatu alat untuk memaksakan suatu perbuatan dan sekaligus larangan terhadap suatu perbuatan tertentu.
- b. Mengidentifikasi individu dengan kelompok lainnya.
- c. Menjaga solidaritas antaranggota masyarakat.

Adat istiadat (*custom*)

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakatnya sehingga anggota masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi yang keras.

2. Jenis-jenis Lembaga Sosial

Soekanto (2002: 203) membedakan lembaga kemasyarakatan/sosial menjadi lembaga kemasyarakatan sebagai peraturan (*operative social institutions*) dan lembaga kemasyarakatan yang sungguh-sungguh berlaku (*operative social institutions*). Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai peraturan apabila norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku anggota masyarakat

Misalnya, lembaga perkawinan mengatur hubungan antara pria dan wanita. Paksaan hukum dalam pelaksanaan lembaga kemasyarakatan tidak selalu digunakan, namun tekanan diutamakan pada paksaan masyarakat.

Sedangkan lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai yang sungguh-sungguh berlaku apabila norma-norma tersebut sepenuhnya membantu pelaksanaan pola kemasyarakatan. Paksaan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan tergantung dari pertimbangan kesejahteraan, gotong royong, kerja sama, dan sebagainya. Selain itu, norma juga dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini.

1. Norma yang mengatur pribadi manusia. Norma pribadi terdiri dari norma kepercayaan yang dimaksudkan agar manusia beriman dan norma kesucian yang bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih.
2. Norma hubungan antarpribadi. Norma hubungan antarpribadi terdiri dari norma kesopanan dan norma hukum. Norma kesopanan dimaksudkan agar manusia bertingkah laku dengan baik dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan norma hukum dimaksudkan untuk mencapai kedamaian hidup bersama dalam masyarakat, yaitu keserasian antara ketenteraman dan ketertiban.

3. Sistem Pengendalian Sosial (*Social Control*)

Roucek mendefinisikan sistem pengendalian sosial adalah sebagai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Pengertian tersebut mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial ini dapat dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain, individu terhadap kelompok sosial, suatu kelompok terhadap kelompok yang lain atau suatu kelompok terhadap individu. Oleh sebab itu, pengendalian sosial bertujuan untuk menjaga keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Selanjutnya, Roucek membedakan pengendalian sosial berdasarkan sifatnya; preventif, represif, atau kombinasi keduanya. Pengendalian sosial bersifat preventif dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan *informal* dan *formal*, sedangkan pengendalian represif berwujud penjatuhan sanksi kepada anggota yang melanggar atau melakukan penyimpangan dari norma yang berlaku.

Pada dasarnya, proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara tanpa kekerasan (*persuasive*) ataupun dengan paksaan (*coercive*). Cara persuasif akan lebih baik digunakan pada masyarakat yang relatif dalam keadaan tenteram, sedangkan cara *coercive* lebih sering diperlukan dalam masyarakat yang mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi berubah, pengendalian sosial juga berfungsi untuk

membentuk kaidah-kaidah yang baru untuk menggantikan kaidah lama.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengendalian sosial digunakan alat-alat pengendalian sosial, misalnya pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini karena pendidikan telah melembaga pada masyarakat. Selain itu, hukum dalam arti luas juga termasuk alat pengendalian sosial karena hukum dianggap paling ampuh, mempunyai sanksi yang tegas dan dianggap sebagai sarana formal.

Soekanto mengatakan, bahwa perwujudan pengendalian sosial antara lain pemidanaan, kompensasi, terapi atau konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, maka akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan dari seluruh kelompok masyarakat dilanggar sehingga inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak-pihak tertentu). Standar dan patokan untuk kompensasi adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan cidera janji (wan prestasi). Pemidanaan dan kompensasi mempunyai sifat akusator, hal ini karena ada pihak yang kalah dan pihak yang menang.

Terapi dan konsiliasi sifatnya adalah remedial, artinya tujuannya untuk mengembalikan situasi pada keadaan yang semula (yakni sebelum terjadinya perkara atau sengketa). Esensinya, bukanlah siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Standar untuk terapi dan konsolidasi adalah masing-masing normalitas dan keserasian atau harmoni.

Dalam terapi, masing-masing pihak mengambil inisiatif untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu. Pada konsiliasi, masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, baik secara kompromistis ataupun dengan mengundang pihak ketiga.

D. Ciri-Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan

Gillin & Gillin dalam bukunya *General Features of Social Institutions* mengatakan bahwa ciri umum lembaga kemasyarakatan adalah seperti berikut.

1. Merupakan suatu organisasi yang berisi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini berisi tata kelakuan, adat istiadat, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak tergabung dalam satu unit fungsional.

2. Mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Dalam hal ini sistem kepercayaan dan tindakan yang lain baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama.
3. Mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Sebagai contoh, suatu lembaga persaingan bebas dalam kehidupan ekonomi yang bertujuan agar produksi berjalan secara efektif oleh karena para individu akan terpaut pada keuntungan yang akan diperolehnya kepada orang-orang yang mempunyai pengaruh serta mengetahui cara-caranya.
4. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, misalnya peralatan, penggunaannya biasanya akan berlainan untuk masing-masing masyarakat.
5. Mempunyai lambang-lambang yang berbeda, yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. Misalnya, sekolah-sekolah mempunyai lambang yang merupakan ciri khas sekolah tersebut.
6. Mempunyai tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku.

Ciri-ciri tersebut bila diterapkan dalam suatu lembaga, misalnya lembaga perkawinan, maka lembaga perkawinan mempunyai fungsi-fungsi berikut.

- a. Mengatur perilaku seksual dari manusia.
- b. Mengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri dan juga anak-anaknya.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup sebagai naluri manusia yang suka hidup bersama.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan prestise

E. Tipe-Tipe Lembaga Kemasyarakatan

Gillin & Gillin mengklasifikasikan lembaga kemasyarakatan sebagai berikut.

1. Dari sudut perkembangannya, dibedakan menjadi *crecive institutions* dan *enacted institutions*. *Creecive institutions* disebut sebagai lembaga primer, yaitu lembaga yang tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. *Enacted institutions*, yaitu lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga pendidikan.
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat dibagi menjadi *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* adalah lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, misalnya keluarga dan sekolah sedangkan *subsidiary institutions* adalah lembaga

kemasyarakatan yang dianggap kurang penting, misalnya kegiatan rekreasi.

3. Dari sudut penerimaan masyarakat, dibagi menjadi *social sanctioned-institutions (approved)* dan *unsanctioned-institutions*. *Social sanctioned-institutions* adalah lembaga yang diterima masyarakat, misalnya sekolah. Sedangkan *unsanctioned-institutions* adalah lembaga yang ditolak masyarakat, misalnya kelompok penjahat.
4. Dari sudut penyebarannya, dibagi menjadi *general institutions* dan *restricted institutions*. *General institutions* adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal hampir semua masyarakat di dunia, misalnya agama. Sedangkan *restricted institutions* adalah lembaga kemasyarakatan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu, misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, Budha.
5. Dari sudut fungsinya, dibagi menjadi *operative institutions* dan *regulative institutions*. *Operative institutions* adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut, misalnya lembaga industrialisasi. Sedangkan *regulative institutions* adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga tersebut, misalnya pengadilan.

Disadari atau tidak, dalam masyarakat dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Sistem yang mengatur pola-pola hubungan antarlembaga kemasyarakatan disebut *institutional-configuration*.

F. Cara-Cara Mempelajari Lembaga Kemasyarakatan

Maclver dan Charles menggolongkan dalam tiga pendekatan untuk mempelajari lembaga kemasyarakatan.

1. *Analisis secara historis*. Analisis ini bertujuan untuk mempelajari sejarah muncul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan, contohnya mempelajari asal-muasal dan perkembangan lembaga keluarga batih.
2. *Analisis komparatif*. Analisis komparatif bertujuan menelaah dengan cara membandingkan suatu lembaga tertentu dari berbagai masyarakat ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat, contohnya berbagai praktik pendidikan pada anak-anak diberbagai masyarakat.
3. *Analisis fungsional*. Analisis fungsional dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antarlembaga berdasarkan fungsinya, hal ini dapat dilakukan dengan analisis historis maupun analisis komparatif, misalnya mempelajari tentang lembaga perkawinan, maka perlu

mempelajari pula lembaga keluarga, lembaga kewarisan, dan lain-lain.

Ketiga analisis untuk mempelajari lembaga kemasyarakatan di atas tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tetapi ketiganya saling melengkapi.

BAB VI

PERUBAHAN SOSIAL

A. Definisi Perubahan Sosial

Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas.

Perubahan sosial merupakan proses wajar dan akan berlangsung terus-menerus. Namun, tidak semua perubahan sosial menuju ke perubahan yang positif sehingga persoalan ini penting dibicarakan. Dalam kaitannya dengan pembangunan, maka suatu pembangunan hanya dapat dicapai melalui proses perubahan sosial. Dalam kaitannya dengan modernisasi, adanya perubahan sosial menjadi jalan atau pintu yang membuka manusia ke arah kemajuan. Selanjutnya, sikap mental modern dan teknologi canggih akan memperlancar proses pembangunan suatu bangsa. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa itu suatu modernisasi dan keberlangsungan pembangunan, dibutuhkan kondisi perubahan sosial yang progresif.

Pembicaraan mengenai perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial (*social change*) dan perubahan kebudayaan (*cultural change*) dapat dipisahkan untuk keperluan teori, tetapi di dalam kehidupan nyata, keduanya tidak terpisahkan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat yang tidak berkebudayaan. Budaya ada karena adanya masyarakat. Perbedaan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan. Tetapi, pada umumnya perubahan-perubahan budaya menekankan ada perubahan sistem nilai, sedangkan perubahan sosial pada sistem pelebagaan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

Perubahan masyarakat pertanian tradisional ke arah masyarakat industri modern ditandai oleh perubahan-perubahan dalam sistem nilai masyarakat industri, umpamanya lebih banyak berorientasi pada nilai-nilai rasional dan komersial ketimbang masyarakat pertanian.

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, nonsosial, pola-pola perilaku organisasi, juga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kebiasaan tanggung jawab kepemimpinan, dan sebagainya.

Beberapa definisi para ahli tentang perubahan sosial adalah sebagai berikut.

1. Gillin & Gillin mengatakan, bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dalam cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan, baik karena perubahan-perubahan, kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan sanitasi.
2. Samuel Koenig mengatakan, bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia.
3. Kingsley Davis mengartikan perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
4. Bruce J. Cohen mengemukakan, bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan struktur sosial dan perubahan pada organisasi sosial. Misalnya, perubahan dalam satu segi dari kehidupan sosial oleh karena menunjukkan terjadi perubahan dalam struktur, dalam perubahan itu adalah sistem dalam pergaulan sosial yang menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.
5. Roucek & Warren mengemukakan, bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat.
6. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di antaranya kelompok-kelompok dalam masyarakat.
7. Soedjono Dirdjosiswojo merumuskan definisi perubahan sosial sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial.
8. Ogburn dan Nimkoff menyatakan, bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang imaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial.
9. Maciver mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.

B. Ruang Lingkup Perubahan Sosial

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi bidang yang sangat luas. Perlu diingat kembali pengertian perubahan sosial yang lebih komprehensif yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan, bahwa perubahan sosial adalah "segala perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat" Perubahan sosial meliputi berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan teknologi. Sebaliknya, perubahan sosial yang terjadi dapat hanya meliputi bidang tertentu saja dan terbatas pula ke dalamnya. Misalnya, perubahan pada bidang pendidikan yang baru mencapai taraf norma dan nilai belum sampai ke taraf perilaku. Perilaku sosial dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok sosial, kelompok besar, maupun kelompok yang sangat besar. Perubahan sosial pada bidang tertentu yang akan berlaku pada tingkat yang luas, misalnya tentang timbulnya kesadaran terhadap usaha pelestarian lingkungan di dalam pembangunan.

Lingkup perubahan sosial yang sangat luas memerlukan adanya pembatasan pada saat membicarakannya pada suatu masyarakat sehingga analisis menjadi tidak kabur. Lauer membuat deskripsi tingkat analisis perubahan sosial seperti berikut ini.

Deskripsi tersebut mempermudah pemahaman pada tingkat mana perubahan yang terjadi. Misalnya, analisis organisasi dapat dilakukan dengan kawasan studi pada struktur organisasinya, pola interaksi anggotanya, struktur kekuasaan, dan produktivitasnya. Wakil unit studinya adalah tentang peranan, tingkat produksi, keluaran, dan lain-lainnya.

C. Hubungan antara Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan

Pandangan yang tegas tentang pengertian masyarakat dan kebudayaan biasanya akan berujung pada munculnya teori-teori yang membedakan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan.

Tingkat Analisis Perubahan Sosial

Tingkat Analisis	Wakil Kawasan Studi	Wakil Unit-Unit Studi
Global	Organisasi Internasional,	GNP: data perdagangan
Peradaban	Lingkaran kehidupan peradaban atau pola-pola perubahan lain (misalnya: evolusioner atau dialektika)	Inovasi ilmiah, kesenian dan inovasi lain-lain; institusi sosial
Kebudayaan	Kebudayaan material; kebudayaan non material	Teknologi; Ideologi; nilai-nilai
Masyarakat	Sistem stratifikasi; struktur; demografi; kejahatan	Pendapatan; kekuasaan dan gengsi peranan; pertumbuhan penduduk tingkat pembunuhan
Istitusi	Ekonomi; pemerintahan; agama; perkawinan dan keluarga; pendidikan	Pendapatan keluarga; pola pemilihan umum; jemaah gereja dan masjid; tingkat perceraian; proporsi penduduk di perguruan tinggi
Organisasi	Struktur; pola interaksi; struktur kekuasaan; produktivitas	Peranan; klik; persahabatan; administrasi/tingkat produksi; output para pekerja
Interaksi	Tipe interaksi; komunikasi	Jumlah konflik; kompetisi atau kedekatan; identitas keseringan dan kejarangan partisipasi interaksi
Individu	Sikap	Keyakinan mengenai berbagai persoalan aspirasi

Davis berpendapat, bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi perubahan dalam kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, aturan aturan, serta bentuk organisasi sosial. Sosiolog akan cenderung melihat perubahan kebudayaan yang berpangkal dan muncul dari organisasi sosial serta mempengaruhinya. Hal ini dapat ditinjau dari pengertian sosiologi tentang masyarakat dan kebudayaan. Davis mendefinisikan masyarakat sebagai sistem hubungan, dalam arti hubungan antara organisasi-organisasi, dan bukan hubungan antara sel-sel. Ia berpendapat, bahwa kebudayaan meliputi segenap tingkah laku, cara berpikir yang muncul dari interaksi yang bersifat komunikatif, seperti penyampaian pikiran secara simbolis dan bukan karena warisan yang berdasarkan keturunan.

Taylor mengatakan, bahwa kebudayaan adalah suatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari unsur-unsur tersebut.

Selo Soemardjan menegaskan, bahwa perubahan-perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu kedua-duanya bersangkutan paut dengan, suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara-cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Pada dasarnya, ciri-ciri dari proses perubahan sosial antara lain sebagai berikut

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat.
2. Secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dikategorikan Smelser sebagai:
 - a. *social proces: the circulation of various rewards, facilities, and personel in an existing structure;*
 - b. *segmentation: the prolifiration of structural units that do not differ qualitatively from existing units;*
 - c. *structural change: the emerge of qualitatively new complexes of roles ana organization;*
 - d. *changes in group structure: the shifts in the composition of groups, the leve, of consciousness of groups, and the relations among the group in society.*

D. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap

keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan, bahwa secara umum penyebab, dari perubahan sosial budaya dibedakan atas dua golongan besar, yaitu:

- perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri,
- perubahan yang berasal dari luar masyarakat.

I. Perubahan yang berasal dari masyarakat

a) Perkembangan ilmu pengetahuan

Pengetahuan yang makin luas menghasilkan teknologi canggih yang kemudian mengubah kehidupan manusia. Jika pada zaman dahulu manusia mencari makan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan makanan, maka saat ini dengan menanamnya. Jika dahulu manusia bertempat tinggal di gua-gua, di rumah-rumah dengan dinding alang-alang, maka saat ini manusia tinggal di rumah-rumah yang lebih sehat dengan bermacam-macam model rumah. Jika dahulu alat angkut manusia sangat sederhana, maka saat ini manusia telah menggunakan alat-alat transportasi mesin yang canggih.

Penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, baik berupa teknologi maupun berupa gagasan-gagasan menyebar ke masyarakat, dikenal, diakui, dan selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial.

Menurut Syani (2002), timbunan kebudayaan merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang penting. Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terjadi penemuan, yaitu suatu kebudayaan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Bertimbunnya kebudayaan ini oleh karena adanya penemuan baru dari anggota masyarakat pada umumnya.

Menurut Koentjaraningrat, faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut.

- Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya.
- Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan.
- Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

b) Jumlah penduduk

Masalah kependudukan yang menimbulkan perubahan sosial budaya pada umumnya adalah pertambahan penduduk akibat terjadinya urbanisasi dan sebaliknya, berkurangnya jumlah penduduk pada daerah-daerah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berurbanisasi tersebut.

Urbanisasi penduduk ke kota-kota besar atau tempat-tempat lain yang menjanjikan harapan menimbulkan ketidakseimbangan antara luas daerah beserta sumber-sumber kehidupannya dengan jumlah penduduk yang ada.

Perubahan jumlah penduduk juga merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti pertambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Sementara, pada daerah yang lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk tadi.

c) Pertentangan dan pemberontakan

Pertentangan (konflik) dalam nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan ama dapat menimbulkan perubahan sosial-budaya yang luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat-istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan bila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat kebiasaan yang telah diikuti selama ini. Sebagai contoh, anggapan umum masyarakat Indonesia bahwa "makin banyak anak makin banyak rezeki", "setiap anak mempunyai rezekinya, masing-masing", sehingga tidak menimbulkan kecemasan setiap kali anaknya lahir. Ini pandangan itu mengalami perubahan, bahwa "makin banyak anak makin besar beban ekonomi".

Perubahan sosial yang diakibatkan oleh pertentangan politik dan pemberontakan-pemberontakan di Indonesia telah menunjukkan buktinya. Perubahan-perubahan yang ditimbulkan akibat pertentangan dan pemberontakan selalu berakibat buruk, seperti terhentinya aktivitas perekonomian, inflasi, timbulnya saling curiga, kecemasan, dan lain-lainnya.

Pertentangan antara anggota-anggota masyarakat dapat terjadi karena perubahan masyarakat yang pesat, sebagaimana dijelaskan oleh Roucek & Warren (1984), masyarakat yang heterogen biasanya ditandai kurang dekatnya hubungan antara orang yang satu dengan orang atau kelompok lainnya; individu cenderung mencari jalannya sendiri-sendiri. Semetara itu, kondisi sumber pemenuhan kebutuhan semakin terbatas, sehingga persaingan tidak dapat dihindari; jika proses ini memuncak, maka pertentangan akan terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Pada saat masyarakat dalam keadaan konflik dapat timbul kekecewaan dan keresahan sosial, maka pada saat itu bila individu-individu pada umumnya sangat mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang baru.

2. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat

a) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Adanya interaksi langsung (tetap muka) antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan saling pengaruh. Di samping itu, pengaruh dapat berlangsung pula melalui komunikasi satu arah, yakni komunikasi masyarakat dengan media-media massa.

Interaksi budaya tidak menjamin timbulnya pengaruh satu budaya terhadap budaya lainnya. Suatu masyarakat dapat saja menolak, menyeleksi terlebih dahulu, baru kemudian menyerap unsur-unsur budaya yang sesuai. Respons psikologis individu terhadap *cross-cultural contact* ada empat tipe kemungkinan, yaitu: 1) tipe *passing*, 2) *chauvinist*; 3) *marginal*, dan 4) *mediating*. Pada respons *passing*, individu menolak kebudayaannya yang asli dan mengadopsi kebudayaan yang baru. Hal ini terjadi bila status kebudayaan yang baru lebih tinggi. Respons *chauvinist* menunjukkan bahwa individu menolak sama sekali pengaruh-pengaruh budaya asing, mereka mundur kembali kepada kebudayaan asli mereka dan biasanya mereka ini menjadi nasionalis yang militan dan pejuang yang kuat untuk menolak pengaruh-pengaruh asing tersebut. Respons *marginal* adalah respons yang terombang-ambing di antara kebudayaan aslinya sendiri dengan kebudayaan masyarakat lain yang asing tersebut. Sedangkan pada respons *mediating*, individu dapat menyatukan bermacam-macam identitas budayanya, mempunyai keseimbangan integrasi, dan memperoleh *personality* dua atau beberapa kebudayaan. Respons individu bersifat selektif, kombinasi dan mensintesis, tanpa melalaikan inti budayanya sendiri. Dari keempat reaksi terhadap kontak silang ini, respons individu atau masyarakat yang diinginkan adalah respons tipe *mediating*.

b) Peperangan

Peperangan yang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak, seperti halnya dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan-pertentangan. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh peperangan lebih dahsyat karena peralatan perang biasanya lebih canggih pula.

Pada akhir uraian tentang perubahan sosial ini perlu dikemukakan pendapat Rogers dan Shoemaker. Menurut mereka, perubahan sosial mengikuti tiga tahap, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tahap pertama terjadi invensi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan.
- 2) Tahap kedua terjadi difusi, yaitu penyebaran atau pengkomunikasian ide-ide ke dalam sistem sosial.

- 3) Tahap ketiga adalah konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi.

Ada tiga faktor penyebab utama dalam perubahan sosial, yaitu penimbunan (akumulasi) kebudayaan, penambahan penduduk, dan penemuan-penemuan baru.

3. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia

Menurut Soekanto, sebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik yang kadang-kadang disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat itu sendiri. Misalnya, penebangan liar oleh segolongan anggota masyarakat memungkinkan untuk terjadinya tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya.

E. Bentuk Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi perubahan tak berencana dan perubahan berencana.

1. Perubahan evolusi dan perubahan revolusi

a. *Perubahan evolusi*

Bohannon mengatakan, bahwa evolusi adalah perubahan yang lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana. Hal ini terjadi sebagai akibat usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru yang muncu mengikuti pertumbuhan masyarakat.

Inkeles menggolongkan teori evolusi menjadi tiga bentuk.

- 1) *Unilinear theory of evolution*. Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahapan tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks, sampai pada tahap yang sempurna. Pelopor teori ini antara lain August Comte dan Herbert Spencer. Hal senada juga diungkapkan Vilfredo Pareto, yang mengemukakan *Cyclical Theories*. Ia berpendapat, bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai tahap-tahap perkembangan yang merupakan lingkaran, di mana suatu tahap tertentu dapat dilalui berulang-ulang. Pitirim A. Sorokin berpendapat, bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Ia membedakan data

tiga tahap, yaitu tahap pertama; yang dasarnya adalah kepercayaan, tahap kedua; dasarnya adalah panca indera manusia, dan tahap ketiga; dasarnya adalah kebenaran.

- 2) *Universal theory of evolution*. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Herbert Spencer mengatakan, bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen, baik sifat maupun susunannya.
- 3) *Multilined theories of evolution*. Teori ini berfokus pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat, misalnya penelitian tentang pengaruh sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke pertanian, terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan.

b. Perubahan revolusi

Berbeda halnya dengan perubahan yang bersifat revolusi, di mana perubahan berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena sudah ada perencanaan sebelumnya atau mungkin tidak berguna sekali, perubahan revolusi sering kali diawali oleh ketegangan-ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan; ketegangan-ketegangan itu sulit untuk dihindari, bahkan banyak yang tidak bisa dikendalikan, sehingga kemudian menjelma dengan terjadinya tindakan revolusi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pokok dari revolusi adalah seperti berikut.

- 1) Adanya perubahan yang cepat. Ukuran kecepatan revolusi sangat relatif, hal ini karena revolusi dapat memakan waktu yang lama. Misalnya, Revolusi Industri di Inggris, yang mana perubahan berlangsung dari tahap produksi tanpa mesin ke tahap produksi dengan mesin, sehingga revolusi di Inggris dianggap cepat.
- 2) Perubahan tersebut menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Misalnya, perubahan di Inggris tersebut dapat dikatakan sebagai revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti hubungan antarmajikan dengan buruh yang sistem kekeluargaan.

Menurut Soekanto, syarat-syarat terjadinya suatu revolusi adalah sebagai berikut.

- (1) Ada keinginan, namun untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
- (2) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
- (3) Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut, untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat.
- (4) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah, bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan sesuatu ideologi tersebut.
- (5) Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum (pemilihan waktu yang tepat) yang dipilih keliru, maka revolusi dapat gagal.

2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar

Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan-perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat, misalnya perubahan mode pakaian. Perubahan itu hanya akan mengubah industri pakaian, sehingga tidak berpengaruh yang berarti terhadap perubahan lembaga kemasyarakatan.

Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang akan membawa pengaruh pada perubahan lembaga kemasyarakatan, misalnya perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri akan membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan, termasuk perubahan lembaga kemasyarakatan.

3. Perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan-perubahan tersebut. Pihak yang menghendaki perubahan disebut *agent of change*, yaitu seorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan

sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau sering disebut *social planning*.

Contoh perubahan yang dikehendaki, misalnya yang menyangkut bidang politik dan administrasi, yaitu suatu perubahan dari sistem sentralisme yang autokratis ke suatu pemerintahan desentralisasi yang demokratis.

Perubahan sosial yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat.

F. Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Proses Perubahan

1. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan

a. Kontak dengan kebudayaan lain

Ralph Linton mengatakan, bahwa salah satu proses yang menyangkut kontak dengan kebudayaan lain adalah difusi. Ia mengartikan difusi sebagai proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu yang lain dan dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, sehingga dapat dihimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Difusi berperan dalam penyebaran penemuan baru pada masyarakat luas sehingga seluruh manusia menikmati manfaatnya.

Soekanto membedakan difusi menjadi dua, yaitu difusi intramasyarakat (*intrasociety diffusion*) dan difusi antarmasyarakat (*intersociety diffusion*). Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi intramasyarakat antara lain sebagai berikut.

1. Suatu pengakuan bahwa unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan.
2. Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi diterima atau tidaknya unsur-unsur baru tersebut.
3. Unsur baru yang berlawanan dengan fungsi unsur lama kemungkinan besar tidak akan diterima.
4. Kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru tadi akan mempengaruhi apakah hasil penemuannya itu dengan mudah diterima atau tidak.
5. Pemerintah dapat membatasi proses difusi tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi antarmasyarakat antara lain sebagai berikut.

1. Adanya kontak antara masyarakat-masyarakat tersebut.
2. Kemampuan untuk mendemonstrasikan kemanfaatan penemuan baru tersebut.
3. Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut.

4. Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang menyaingi unsur-unsur penemuan baru tersebut.
5. Peranan masyarakat yang menyebarkan penemuan baru di dunia ini.
6. Paksaan dapat juga dipergunakan untuk menerima suatu penemuan baru.

Cara lain terjadinya difusi adalah adanya pertemuan antara individu dari satu masyarakat dengan individu dari masyarakat yang lain. Selain itu, pemasukan secara damai (*penetration pacifique*) juga memungkinkan terjadinya difusi. Berhubungan dengan perubahan, difusi akan memperlancar proses perubahan, selain itu difusi juga akan memperkaya dan menambah unsur-unsur kebudayaan, yang sering kali memerlukan perubahan dalam lembaga kemasyarakatan atau bahkan penggantian lembaga kemasyarakatan yang lama dengan yang baru, apalagi pada masa reformasi seperti yang sedang berlangsung di Indonesia.

b. Sistem pendidikan formal yang maju

Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan berpikir ilmiah serta objektif. Hal ini akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan zaman atau tidak.

- a. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Sikap ini akan mendorong bagi usaha-usaha penemuan baru.
- b. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik.
- c. Sistem stratifikasi terbuka. Sistem ini memungkinkan adanya mobilitas sosial vertikal yang luas atau berarti memberikan kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri.
- d. Penduduk yang heterogen. Masyarakat yang heterogen dan segala hal akan mempermudah terjadinya pertentangan yang akhirnya berujung sebagai pendorong bagi terjadinya perubahan dalam masyarakat.
- e. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan yang berlangsung terlalu lama dalam masyarakat memungkinkan menimbulkan revolusi.
- f. Orientasi ke masa depan.
- g. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

2. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan

Sockanto menyebutkan, ada 10 faktor yang menghalangi terjadinya perubahan.

- a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang terisolasi sehingga tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain yang mungkin akan memperkaya kebudayaannya. Dampak dari hal ini adalah para anggota masyarakat terkungkung pola-pola pemikirannya oleh tradisi.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Hal ini juga biasanya terjadi pada masyarakat yang terisolasi.
- c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Hal ini terjadi pada masyarakat yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tidak dapat diubah.
- d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau *vested interests*.
- e. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Pemikiran ini muncul dari anggapan bahwa unsur-unsur luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi dan menyebabkan perubahan pada aspek tertentu dalam masyarakat.
- f. Prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup
- g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha perubahan pada unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha yang melawan ideologi masyarakat.
- h. Adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila kemudian ternyata pola-pola perilaku tersebut tidak efektif lagi, maka krisis akan muncul.
- i. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

G. Proses Perubahan Sosial dan Kebudayaan

1. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan

Selo Soemardjan mengatakan, bahwa suatu perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Penyesuaian dari lembaga kemasyarakatan lebih menunjuk pada keadaan di mana masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan keadaan yang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat lebih menunjuk pada usaha-usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah diubah atau diganti agar

terhindar dari disorganisasi psikologis. Menurut Kroef agar individu tidak mengalami tekanan-tekanan psikologis, maka harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Saluran perubahan sosial dan kebudayaan

Saluran perubahan sosial dan kebudayaan adalah saluran yang dilewati oleh suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran perubahan sosial dan kebudayaan dapat berbentuk lembaga kemasyarakatan dalam bidang pendidikan, ekonomi, agama, pemerintahan, rekreasi, dan lain-lain. Pada dasarnya, saluran perubahan sosial dan kebudayaan berfungsi agar perubahan dikenal, diakui, diterima, dan digunakan oleh masyarakat.

3. Disorganisasi (disintegrasi) dan reorganisasi (reintegrasi)

Soekanto mengartikan disorganisasi sebagai suatu keadaan dimana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Misalnya, di dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai organisasi, harus ada keserasian antarbagian-bagiannya. Kriteria terjadinya disorganisasi antara lain terletak pada persoalan apakah organisasi tersebut berfungsi secara semestinya atau tidak. Selain itu, disorganisasi dalam masyarakat sering dihubungkan dengan moral, yaitu anggapan-anggapan tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Lebih lanjut Soekanto menyimpulkan, bahwa disorganisasi atau disintegrasi mungkin dapat dirumuskan sebagai proses berpudarnya norma-norma dan nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Reorganisasi atau reintegrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Tahap reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat.

4. Ketidakserasian perubahan-perubahan dan ketertinggalan budaya (*cultural lag*)

Ketidakserasian memungkinkan terjadinya kegoyahan dalam kehidupan masyarakat dan memungkinkan naiknya frekuensi kejahatan. Suatu teori mengenai perubahan dalam masyarakat adalah teori ketertinggalan budaya (*cultural lag*) dari Ogburn. Teori tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya dalam keseluruhannya. Ada bagian yang tumbuh cepat dan ada bagian lain yang tumbuh lambat. Perbedaan taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat itulah yang disebut *cultural lag*. Juga suatu ketertinggalan terjadi apabila laju perubahan dari dua unsur

masyarakat atau kebudayaan yang mempunyai korelasi tidak sebanding sehingga unsur yang satu tertinggal oleh unsur yang lainnya.

Ogburn dan Nimkoff menjelaskan, bahwa pengertian ketertinggalan dapat digunakan paling sedikit dalam dua arti, yaitu; *pertama*, sebagai jangka waktu antara terjadi dan diterimanya penemuan baru; *kedua*, dipakai untuk menunjuk pada tertinggalnya suatu unsur tertentu terhadap unsur yang lainnya yang erat hubungannya.

Untuk mengatasi agar tidak terjadi ketertinggalan budaya, antara lain dengan melembagakan cara berpikir ilmiah dalam diri masing-masing individu, terutama pada masyarakat yang sedang berkembang.

5. Arah perubahan (*directing of change*)

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan, bahwa perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan bergerak ke arah suatu bentuk yang sama sekali baru atau bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Salah satu jenis perubahan dapat dilakukan dengan mengadakan modernisasi.

BAB VII

MODERNISASI

A. Gejala Modernisasi

Istilah modernisasi mulai populer sejak revolusi industri di Inggris yang berlangsung tahun 1760-1830 dan revolusi politik di Prancis tahun 1789-1794. Bila dilihat dari sejarahnya, modernisasi merupakan perubahan sosial yang membawa kemajuan dalam bidang ekonomi dan bidang politik. Perubahan-perubahan yang dialami oleh bangsa Eropa ini mempengaruhi kemajuan pada bidang-bidang kehidupan lainnya dan merembes ke negara-negara sedang berkembang hingga saat ini.

Dalam artian yang menyeluruh, modernisasi meliputi segala aspek kehidupan. Akan tetapi, dalam arti sempit, modernisasi sering kali diartikan sebagai kemajuan dalam bidang teknologi dan yang paling spektakuler perubahan dalam proses produksi bidang pertanian.

Pada dasarnya, semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senantiasa terlibat dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan dan arah perubahannya, berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Proses modernisasi itu sangat luas, hampir-hampir tidak bisa dibatasi ruang lingkup dan masalahnya, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan seterusnya. Secara historis, modernisasi merupakan perubahan-perubahan-masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat modern. Proses perubahan itu didorong oleh berbagai usaha masyarakat dalam memperjuangkan harapan dan cita-citanya, yaitu perubahan kehidupan dan penghidupan yang ada menjadi lebih baik. Karakteristik yang umum dari modernisasi adalah menyangkut bidang-bidang tradisi-tradisi sosial kemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kependudukan yang digambarkan dengan istilah mobilitas sosial. Maksudnya, bahwa suatu proses unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola perilaku. Perwujudannya adalah aspek kehidupan modern, misalnya mekanisasi, mass media yang teratur, dan urbanisasi.

Berbagai bidang modernisasi tersebut berproses sehingga mencapai pola-pola perikelakuan baru yang berwujud pada kehidupan masyarakat modern. Sayangnya, penggunaan istilah modernisasi banyak disalahtafsirkan sehingga sisi moral sebagai pengendali terkadang tertinggal jauh. Tidak sedikit orang menganggap modernisasi semata-mata sebagai sesuatu kebebasan yang bersifat keduniaan. Tidak

mengherankan pula kalau banyak anggota masyarakat yang menjadi keliru dalam berkiprah terhadap konsep modernisasi lantaran kemajemukan dari bidang-bidang kehidupan yang menjadi ruang lingkungannya. Ada yang menganggap modernisasi sebagai suatu lambang kebebasan lain lagi ada yang menganggap sebagai peniruan cara Barat (westernisasi), bahkan ada sebagian lagi menganggap modernisasi sama dengan sekularisasi. Kebebasan diartikan sebagai keleluasaan bergaul dengan meninggalkan norma kesopanan dan norma kesusilaan; westernisasi dapat mengakibatkan menurunnya nilai produksi dalam negeri sendiri dan melunturkan kecintaan terhadap tanah air. Sementara, sekularisasi dapat mengakibatkan rusaknya mental dan lunturnya kesucian nilai-nilai keagamaan.

Gejala-gejala modernisasi dalam berbagai bidang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ekonomi muncul industri-industri besar, terbukanya kesempatan kredit bagi industri dari berbagai lembaga-lembaga keuangan. Dalam bidang pertanian muncul teknologi-teknologi tinggi yang mampu mengefisiensikan tenaga manusia dan melipatgandakan, bahkan lebih dari hasil-hasil produksi. Dalam bidang politik, modernisasi ditandai oleh keseragaman hukum. Ini dicapai melalui kesadaran hukum yang tinggi, yang sebelumnya ditumbuhkan melalui proses pendidikan dalam masyarakat secara formal dan melalui media komunikasi massa. Kemajuan dalam bidang apa pun memerlukan alat komunikasi yang mampu menjangkau kawasan luas dengan efisien. Berbagai gejala modernisasi dimungkinkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak jarang pula modernisasi diartikan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian modernisasi meliputi pula aspek mental manusianya. Pendekatan sikap mental tertentu yang mencirikan manusia modern dikemukakan oleh teori-teori psikologi dan sosiologi.

Modernisasi sering dihubungkan dengan teori evolusi. Bila dipandang dari teori evolusi, maka modernisasi adalah sesuatu yang mutlak berlangsung. Masyarakat akan terus berkembang mengikuti tahap-tahap tertentu, mulai dari tahap kebudayaan rendah menuju tahap kebudayaan tinggi atau sering disebut dari perkembangan yang lebih rendah menuju perkembangan yang lebih kompleks dan kemudian menuju perkembangan yang sempurna. Teori evolusi unilinear ini berkembang menjadi teori evolusi multilinear. Dalam teori evolusi ini, dipandang bahwa masyarakat mengikuti suatu perkembangan yang umum (universal) dan juga pada saat yang bersamaan melakukan perkembangan yang spesifik (khusus) karena penyesuaiannya terhadap situasi khusus masing-masing.

Ini berarti, bahwa secara umum, masyarakat beserta

kebudayaannya terus berkembang ke arah kemajuan, namun arah perkembangan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi, nilai dan norma, serta adat istiadat masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, arah perkembangan ke arah kemajuan atau disebut dengan pembangunan tidak selalu mengarah ke kebudayaan Barat yang sering diidentikkan dengan modernisasi. Arah perubahan banyak bergantung pada pandangan masyarakat, apakah modernisasi tersebut dianggap sebagai suatu kemajuan atau tidak, dipandang bermanfaat atau tidak, diperlukan atau sebaliknya, perlu dihindari. Menurut Schoorl, modernisasi memerlukan motif yang memang memerlukan adanya modernisasi. Modernisasi tidak mutlak perlu apabila masyarakat (negara) sedang berkembang merasa tidak perlu mengejar sejumlah tujuan atau beranggapan tidak perlu berbuat demikian (mengikuti suatu modernisasi).

Modernisasi merupakan fenomena perubahan sosial budaya. Perubahan sosial (masyarakat) dalam pandangan Durkheim adalah perubahan dari masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanik menuju masyarakat yang bercirikan masyarakat solidaritas organik. Menurut berbagai ahli, perubahan dari masyarakat kuno menuju masyarakat komunisme. Comte mengemukakan, bahwa perubahan berlangsung dari masyarakat pola teleologis menuju masyarakat pola ilmiah. Jika teori siklus berpandangan bahwa perubahan sebagai proses yang wajar dan akan terus berlangsung, maka teori fungsional struktural berpendapat suatu perubahan struktur, yaitu perubahan yang menyangkut nilai-nilai dasar terjadi karena pengaruh sistem yang ada di luar suatu sistem yang berubah tersebut.

B. Pengertian dan Syarat Modernisasi

1. Pengertian

Dalam rangka menghindari kesimpangsiuran pengertian dan kekeliruan dalam menafsirkan istilah modernisasi tersebut, maka dikemukakan beberapa pendapat para ahli berikut ini.

- a. Astrid S. Susanto; modernisasi adalah proses pembangunan kesempatan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan.
- b. Widjojo Nitisastro; modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern, dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis.
- c. Soerjono Soekanto; modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (*directed change*) yang didasarkan pada suatu perencanaan, yang biasanya dinamakan *social planning*. Proses modernisasi meliputi

- bidang-bidang yang sangat luas, menyangkut proses disorganisasi, problem sosial, konflik antarkelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan sebagainya.
- d. Louis Irving Horowitz; modernisasi yang nonideologis pada dasarnya merupakan suatu istilah teknologi, bukan suatu istilah penilaian. Ia menyangkut penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin-mesin. Modernisasi berkaitan dengan komunikasi informasi dalam tempo cepat, pemindahan orang dan barang dengan cepat, otomasi jasa-jasa, dan sebagainya.
 - e. Harold Rosenberg; modernisasi adalah sebagai sebuah tradisi baru. Modernisasi mengacu pada urbanisasi atau sampai sejauh mana dan bagaimana pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu masyarakat berlangsung.
 - f. Alex Inkeles; ada sikap-sikap tertentu yang menandai manusia dalam setiap masyarakat modern. Di antara sikap-sikap ini ada kegandrungan buat menerima gagasan-gagasan baru serta mencoba metode-metode baru, kesediaan buat menyatakan pendapat; kepekaan pada waktu yang membuat manusia lebih mementingkan waktu kini dan waktu mendatang daripada waktu lampau; rasa ketepatan waktu yang lebih baik; keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi; kecenderungan buat memandang dunia sebagai sesuatu yang bisa dihitung, kepercayaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi; dan akhirnya, keyakinan pada keadilan yang bisa diratakan.
 - g. Ramon; modernisasi merupakan proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam seluruh aspeknya, dari tradisional ke modern.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara garis besar, istilah modern mencakup pengertian sebagai berikut.

1. Modern berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya taraf penghidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata.
2. Modern berarti berkemanusiaan dan tinggi nilai peradabannya dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Ogburn dan Nimkoff berpendapat, bahwa modernisasi tidak sama dengan reformasi yang menekankan pada faktor-faktor rehabilitasi; modernisasi bersifat preventif dan konstruktif, serta agar proses tersebut tidak mengarah kepada angan-angan, maka sebaliknya, modernisasi harus dapat memproyeksikan kecenderungan yang ada dalam masyarakat dewasa ini ke arah waktu-waktu yang mendatang.

2. Syarat-syarat modernisasi

Adapun syarat-syarat suatu modernisasi menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut.

- a) Cara berpikir yang ilmiah (*scientific thinking*) yang *institutionalized* dalam *the ruling class* maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik.
- b) Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan *bureaucracy* (birokrasi).
- c) Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan pengertian yang kontinu agar data termaksud tidak tertinggal.
- d) Penciptaan iklim yang *favourable* dalam masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap, karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat (*belief system*).
- e) Tingkat organisasi yang tinggi, yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
- f) Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan *social planning*.

Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu golongan kecil dalam masyarakat.

Cyril Black yang mendasarkan pandangannya sebagai seorang ahli sejarah, menyarankan dalam karangannya, bahwa masyarakat modern ditandai oleh bertumbuhnya ilmu pengetahuan baru dan bahwa ini menganggap adanya manusia yang memiliki kemampuan yang semakin meningkat dalam memahami rahasia-rahasia alam dan dapat menerapkan pengetahuan ini dalam berbagai kegiatan manusia. Masyarakat modern sesungguhnya merupakan hasil korelasi antara tingginya nilai peradaban manusia sebagai anggota masyarakat dengan majunya tingkat rasionalitas dalam mengkaji hasil kebudayaan. Dengan demikian, modernisasi memungkinkan terciptanya kehidupan masyarakat yang mantap, sejahtera, adil, makmur, dan merata.

C. Perbedaan dan Persamaan Modernisasi, Westernisasi, dan Sekularisasi

Sebelumnya, secara sepintas telah dikemukakan tentang pengertian modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi, namun sejauh itu belum jelas benar tentang perbedaan dan persamaan masing-masing. Sebelum sampai tahap itu, terlebih dahulu diketahui tentang definisi masing-masing modernisasi secara singkat.

Definisi

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Westernisasi adalah suatu proses peniruan oleh suatu masyarakat atau negara tentang kebudayaan dari negara-negara Barat yang dianggap lebih baik dari kebudayaan sendiri. Menurut J.W. Schoorl, bahwa masyarakat modern seperti sekarang ini dan ciri-cirinya untuk pertama kali berkembang di dalam kebudayaan Barat. Pengambilannya dapat disebut westernisasi.

Sekularisasi adalah suatu proses pembedaan antara nilai-nilai keagamaan (spiritual) dengan nilai-nilai kepentingan keduniaan (material). Jadi, sekular itu adalah semacam ideologi yang menganggap bahwa hidup ini adalah semata-mata untuk kepentingan dunia. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa sekuler adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal keduniawian.

▪ Persamaan

1. Modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi sama-sama mempunyai kepentingan soal keduniaan.
2. Sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang lebih bagi penganutnya.
3. Sama-sama mempunyai unsur-unsur dari negara-negara Barat.
4. Sama-sama merupakan hasil perbandingan dari suatu aspek-aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan.

▪ Perbedaan

1. Modernisasi

1. Tidak mutlak sebagai westernisasi atau sekularisasi.
2. Tidak mempersoalkan atau mengesampingkan nilai-nilai keagamaan.
3. Proses perkembangannya bersifat lebih umum daripada westernisasi ataupun sekularisasi.
4. Modernisasi mutlak bagi setiap negara.

2. Westernisasi

1. Mutlak pem-Baratan.
2. Menurut Schoorl, bahwa paham westernisasi beranggapan semua bentuk kehidupan akan sama, artinya westernisasi itu ada, karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan Barat dan disajikan dalam bentuk Barat, sedangkan

bentuk Barat itu sering dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada.

3. Tidak mempersoalkan atau tidak mempertentangkan kebudayaan Barat dengan kebudayaan negara sendiri.

3. Sekularisasi

1. Berorientasi semata-mata kepada masalah keduniaan.
2. Tidak terikat dengan (atau mengesampingkan) nilai-nilai keagamaan.

Khusus untuk perkembangan paham sekularisasi, pada umumnya negara-negara di dunia ini tidak banyak penganutnya, lebih-lebih untuk negara Indonesia yang pada dasarnya melarang paham tersebut, karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi perkembangan modernisasi dan westernisasi, oleh Schoorl disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengertian modernisasi itu lebih baik daripada westernisasi, *pertama*; karena proses perkembangannya yang umum untuk semua masyarakat, dan *kedua*; pengertian itu dapat menampung bentuk-bentuk khusus kebudayaan dari perkembangan umum tersebut.
2. Bersama dengan proses modernisasi itu terjadi suatu proses westernisasi, karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan Barat dan tersajikan dalam bentuk Barat, sedangkan bentuk Barat itu sering dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada.
3. Secara umum dapat disimpulkan, bahwa sesungguhnya kemajuan atau mungkin kemunduran suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kecakapan-kecakapan, kemajuan ilmu pengetahuan dan penguasaan terhadap perkembangan teknologi. Bagi masyarakat tradisional ada yang hampir sama sekali tidak mengenal istilah modernisasi, westernisasi ataupun sekularisasi, lantaran kekurangan terhadap kecakapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Namun demikian, masih ada sesuatu yang membuat mereka hidup dalam kedamaian, yaitu karena tidak adanya pengaruh luar yang memaksa perubahan ke arah perkembangan yang belum menentu.

D. Modernisasi di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang juga tentunya berupaya untuk mengadakan perubahan dari negara yang kehidupan masyarakatnya tradisional menuju negara modern. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan pembangunan masyarakat yang merupakan proses modernisasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia agar setara dengan masyarakat bangsa yang modern. Oleh sebab itu, modernisasi dalam masyarakat Indonesia dapat

dikatakan terbuka. Artinya, bahwa dalam proses modernisasi tidak tertutup kemungkinan untuk menerima unsur-unsur dari luar. Namun, tentunya harus ada filterisasi (penyaringan) terhadap unsur-unsur dari luar.

Unsur-unsur dari luar yang diambil bangsa Indonesia, antara lain sistem pendidikan, sistem administrasi negara, mode busana, dan lain sebagainya. Agar modernisasi di Indonesia berjalan dengan baik, maka harus didukung budaya bangsa yang mampu mendorong modernisasi. Sirat budaya bangsa yang dapat berperan sebagai pendorong modernisasi, antara lain kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus disertai dengan rasa percaya diri yang tidak mengarah pada fatalisme, kepercayaan pada hari depan yang lebih baik, dan menyadari akan hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, harus didukung oleh sifat cermat, hemat, tepat waktu, dan berani mengambil risiko.

Gejala modernisasi di Indonesia sudah meliputi berbagai bidang kehidupan bangsa, antara lain di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang agama maupun kepercayaan.

E. Gejala Modernisasi di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Gejala modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan masyarakat Indonesia ditandai dengan penemuan (*invention*) dan pembaruan (*innovation*) di berbagai aspek kehidupan bangsa, antara lain adanya alat transportasi yang lebih maju, alat kesehatan, pertanian, serta teknologi dan informasi.

Gejala modernisasi di bidang ekonomi yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi akan lebih meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas dalam bidang ekonomi, lebih efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia. Gejala lain adalah semakin banyaknya industri dengan skala besar dan kualitas yang semakin tinggi.

Gejala modernisasi di bidang politik antara lain sudah mulai diberlakukannya sistem penacrintahan perwakilan, delegasi kekuasaan, pemerintahan yang diawasi dan dibatasi kekuasaannya, dihormati hak-hak asasinya, dan dijamin hak-hak sosialnya.

Gejala modernisasi di bidang agama dan kepercayaan yang diinginkan bangsa Indonesia adalah kemajuan yang mampu menompang dan mendukung keberhasilan serta kemajuan di bidang materi atau lahiriah. Oleh sebab itu perlu dibangun kehidupan agama dan kepercayaan yang mampu memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan kemajuan materi atau lahiriah sehingga bangsa Indonesia mempunyai landasan keimanan dan ketakwaan yang teguh dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 1985, *Sosiologi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Usaha Nasional.
- Amirin, Tatang M., 1986, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: CV Rajawali.
- Arif, Saiful, 2000, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balandier, Georges, 1986, *Antropologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Berry, David, 1995, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta ; Rajawali Press)
- Bottomore, Tom, 1992, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Campbell, Tom, 1994, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Collin, Finn, 1997, *Social Reality*, London: Roudedge.
- Craib, Ian, 1986, *Teori-Teori Sosial Modern: dari Parson sampai Habermas* Jakarta: Rajawali.
- Dirdjosisworo, Soerdjono, 1985, *Asas-Asas Sosiologi*, Bandung: Armico.
- Duverger, Maurice, 1993, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Eisenstadt, S.N., 1986, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, (ten. Candra Johan) Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakih, Mansour, 2000, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Geertz, Clifford, 1992, *Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Giddens, Anthony, 1986, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: UI Press.
- Horton, Paul B. & Chester L. Hunt, 1990, *Sosiologi Jilid I 6- II*, Jakarta: Erlangga.
- I Marsana Windhu, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius.
- J. Cohen, Bruce, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta).

- Kartasapoetra, G, dan L.J. B. Kreimers, 1987, *Sosiologi Umum*, (Jakarta : Bina Aksara).
- Lawang, Robert M.Z., 1985, *Pengantar Sosiologi*, Buku Materi Pokok Kuliah Universitas Terbuka, Jakarta: Karunika.
- M.S, Basrowi, 2002, *Pengantar Sosiologi*, Ciawi - Bogor, Ghalia Indonesia.
- Magnis-Suseno, Franz, 1986, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia.
- Maran, Rafael Raga, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moedjanto, G., 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Jawa*, Yogyakarta: Kanisius.
- Nasikun, 1995, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Adham, 1983, *Sosiologi*, Bandung: Alumni.
- Nazaruddin, Sjamsuddin, 1990, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Noer, Deliar, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pelly, Usman dan Asih Mananti, 1994, *Teori- Teori Sosial Budaya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud.
- Pelly, Usman, 1994, *Teori-Teori Sosial Budaya*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud
- Polak, J.B.A.F. Mayor, 1996, *Sosiologi, Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Jakarta: Balai Buku Ikhtiar.
- Poloma, Margaret M., 1992, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ranoh, Ayub, 1999, *Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Ritzer, George, 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press.
- Roucek & Warren, 1984, *Pengantar Sosiologi* (terj. Sahat Simamora), Jakarta PT Bina Aksara.
- Rush, Michael & Phillip Althoff, 1995, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta Rajawali Pers.

- Schoorl, J.W, 1988, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara - Negara Sedang Berkembang* (terj. RG. Soekadidjo), Jakarta: PT Gramed
- Shadily, Hasan, 1984, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, 1964, *Setangkai Bunga Sosiolo* edisi pertama, Jakarta: Yayasan Badan Penerbitan FE UI.
- Soerjono, Soekanto 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres
- Soerjono, Soekanto, 1974, "Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan pada Hukum. *Hukum Nasional*, Nomor 25.
- Soerjono, Soekanto, 1983, *Beberapa Toeri Sosiologi tentang Struktur Masyarakat* Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjono, Soekanto, 1990, *Sosiologi: RuangLingkup danAplikasinya*, Bandung Remaja Rosdakarya.
- Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susanto, Astrid S., 1977, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta.
- Susilo, Suko, 2001, "Kekuasaan dan Elit Politik Lokal", *Rancangan Penelitian*, Surabaya: PPS Unair.
- Syani, Abdul, 2002, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarbaini, Syahrial, A. Rahman dan Monang Djohado, 2002, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993, *Politik Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wasana Yogyakarta.
- Weber, Max, 1968, "Filsafat Max Weber (dalam Irving M. Zeitlin, 1998), *Rethinking Sociology: a Critique of Contemporary Theory*, (Alih Bahasa Anshori dan Juhanda), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zainuddin, A. Rahman, 1992, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia
- Zeitlin, Irving M., 1998, *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta.



YAYASAN ALUMNI UNDIP

USM

UPT PERPUSTAKAAN

Nomor Panggil

301

SIH

m

C.1

KARTU BUKU

No.Registrasi : 2017SB0055

Pengarang : SIHOTANG, Amri P.

Judul : Mengenal Sosiologi

Tanggal Kembali	NIM	Tanda tangan Peminjam
11-10-17	A.13114.0246	f

301

SIH

m

SIHOTANG, Amri P.

Mengenal Sosiologi

C.1

2017SB0055